# Analisis Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa

**(Tahun 2011-2016)**

SKRIPSI


Oleh :

Nama : Aditya Iswanto

Nomor Mahasiswa : 14313054

Jurusan : Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2018

**Analisis Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa**

**(Tahun 2011-2016)**

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Strata 1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh :


| | |
|---|---|
| Nama | : Aditya Iswanto |
| Nomor Mahasiswa | : 14313054 |
| Jurusan | : Ilmu Ekonomi |

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2018

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Maret 2018

Penulis




Aditya Iswanto

NIM : 14313054

# PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Analisis Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa (Tahun 2011-2016)

| | |
|---|---|
| Nama | : Aditya Iswanto |
| Nomor Mahasiswa | : 14313054 |
| Jurusan | : Ilmu Ekonomi |

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Indah Susantun, Dra.,M.Si



iv

# BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS INFLASI, PRODUK DOMISTIK REGIONAL BRUTO, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENDUDUK MISKIN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PULAU JAWA TAHUN 2011-2016**

Disusun Oleh : **ADITYA ISWANTO**

Nomor Mahasiswa : **14313054**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 9 April 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Indah Susantun, Dra., M.Si. .....

Penguji : Achmad Tohirin, Drs., MA.,Ph.D .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak Yudi Wahyono, Ibu Tentrem dan kakak saya Arinta Wahyanti yang telah mendukung do'a dan pengorbannya tiada terhitung demi kesuksesanku
2. Seluruh keluarga besarku dimanapun kalian berada

## HALAMAN MOTTO

Jika kamu menolong (agama) Allah SWT , niscaya Dia akan menolngmu dan meneguhkan kedudukanmu

(QS. Muhammad : 7)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Asy-Syarh : 5)

Man Jadda Wa Jadda

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia ilmu, rahmat serta hidayahnya skripsi dengan judul "Analisis Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2011-2016" ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW , yang telah membawa petunjuk kebenaran, lentera kehidupan bagi seluruh umat manusia yaitu Ad-Din Al-Islam yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya didunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik berkat dukungan , motivasi, petunjuk dan bimbigan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ibu Indah Susantun, Dra.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr.D.Agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Seluruh Dosen dan staf karyawan Universitas Islam Indonesia yang telah mewariskan ilmunya kepada kami dengan tulus.
4. Bapak Yudi wahyono dan Ibu Tentrem dan Kakakku Arinta wahyanti yang selalu mendoakanku dan selalu mendukung setiap langkah yang kutempuh

sampai saat ini serta rela berkorban demi pendidikan anaknya satu ini . Thanks For My Best Family. I love you

5. Teman-teman seperjuangan dari awal kuliah sampe saat ini , Dedi , Ryan , Aji, Nawwaf , Naufal , dan temen-temen di Manis Manja.
6. Teman-teman kontrakan K O M I Z A ,Ipung , Rizqi , Rifan , Reynaldi , Syamsul , Zanuar .
7. Sahabat-sahabatku yang di tanah rantau "rempongers" yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat keluh kesah sampai saat ini Mita, Rosa, Mia, Ilham, Aziz.
8. Sahabat-sahabatku dari SMP sampai saat ini yang selalu mendukung dan memotivasiku "Hae Browh" Fajar , Suryawan , Novi, Putri.
9. Teman-teman Ilmu Ekonomi 2014
10. Teman-temanku semua dan semua pihak yang telah membantu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatupun yang sempurna kecuali Allah SWT begitu pun dengan skripsi . Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharapkan kritik serta saran agar dapat menjadikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Dan harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Aditya Iswanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL ..... i
HALAMAN JUDUL ..... ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... iii
PENGESAHAN SKRIPSI ..... iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI ..... v
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... vi
HALAMAN MOTTO ..... vii
KATA PENGANTAR ..... viii
DAFTAR ISI ..... x
DAFTAR TABEL ..... xiii
DAFTAR GAMBAR ..... xiv
DAFTAR GRAFIK ..... xv
DAFTAR LAMPIRAN ..... xvi
ABSTRAK ..... xvii
ABSTRACT ..... xviii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 5
1.3 Tujuan Penelitian ..... 5
1.4 Manfaat Penelitian ..... 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ..... 7
2.1 Kajian pustaka : ..... 7
2.2 Landasan Teori : ..... 11
2.2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah ..... 11
2.2.2 Pertumbuhan ekonomi ..... 12
2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..... 18
2.2.4 Inflasi ..... 20
2.2.5 Pengeluaran Pemerintah ..... 22
2.2.6 Kemiskinan ..... 25
2.2.7 Ketimpangan Pendapatan ..... 29
2.3 Kerangka Pemikiran ..... 39
2.4 Hubungan Antar Variabel ..... 39

2.4.1 Hubungan Inflasi dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan ..... 39
2.4.2 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan ..... 40
2.4.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan ..... 41
2.4.4 Hubungan Penduduk Miskin dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan ..... 42
2.5 Hipotesis Penelitian ..... 44
BAB III METODE PENELITIAN ..... 45
3.1 Jenis Data ..... 45
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian ..... 45
3.2.1 Variabel Dependen ..... 45
3.2.2 Variabel Independen ..... 46
3.3 Metode Analisis ..... 47
3.3.1 Common Effect Metode ..... 48
3.3.2 Metode Fixed Effect ( FEM ) ..... 48
3.3.3 Metode Random Effect ( REM ) ..... 49
3.4 Pemilihan Model ..... 50
3.4.1 Chow Test ..... 50
3.4.2 Hausman Test ..... 51
3.5 Uji Statistik ..... 51
3.5.1 Koefisien Determinasi ($R^2$) ..... 51
3.5.2 Uji Statistik t ..... 52
3.5.3 Uji F ..... 53
BAB IV HASIL DAN ANALISIS ..... 55
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ..... 55
4.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel ..... 57
4.2.1 Common Effect Model (CEM) ..... 57
4.2.2 Fixed Effect Model (FEM) ..... 57
4.2.3 Random Effect Model (FEM) ..... 58
4.3 Pemilihan Model dalam Pengolahan data ..... 58
4.3.1 Chow Test (Uji F-Statistik) ..... 58
4.3.2 Uji Hausman ..... 59
4.4 Hasil Pengujian statistik ..... 60
4.4.1 Koefisien Determinasi (R2) ..... 61

4.4.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individu ( Uji t)..... 61
4.4.3 Pengujian Signifikansi Simultan ( Uji F)..... 63
4.5 Interpretasi Hasil dan Analisis ..... 64
4.5.1 Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan..... 64
4.5.2 Analisis Pengaruh Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan ..... 65
4.5.3 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan ..... 66
4.5.4 Analisis Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan..... 70
4.5.5 Klasifikasi Kelompok Estimasi Intersep Provinsi di Pulau jawa .... 71
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI..... 73
5.1 Kesimpulan..... 73
5.2 Implikasi :..... 74
DAFTAR PUSTAKA ..... 76
LAMPIRAN..... 79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Pulau-Pulau di Indonesia..... 3
Tabel 1. 2 Indeks Gini Pulau-Pulau Di Indonesia..... 4
Tabel 4. 1 Produk Domestik Regional Bruto Pulau-Pulau di Indonesia..... 55
Tabel 4. 2 Indeks Gini Pulau-Pulau Di Indonesia..... 56
Tabel 4. 3 Hasil Uji Data Panel dengan Common Effect Model..... 57
Tabel 4. 4 Hasil Uji Data Panel dengan Fixed Effect Model..... 57
Tabel 4. 5 Hasil Uji Data Panel dengan Random Effect Model ..... 58
Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Chow Test..... 59
Tabel 4. 7 Hasil Uji hausman..... 60
Tabel 4. 8 Hasil Estimasi Random Effect Model..... 60
Tabel 4. 9 Klasifikasi Kelompok Estimasi Intersep Provinsi di Pulau jawa..... 71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kurva Lorenz.....34

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2011 ..... 67
Grafik 4. 2 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2012 ..... 68
Grafik 4. 3 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013 ..... 68
Grafik 4. 4 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 ..... 68
Grafik 4. 5 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 ..... 69
Grafik 4. 6 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016 ..... 70

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Indeks Gini Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016 ..... 79
Lampiran 1. 2 Pengeluaran pemerintah Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016 ..... 79
Lampiran 1. 3 Presentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016 ..... 79
Lampiran 1. 4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016 ..... 80
Lampiran 1. 5 Inflasi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016..... 80
Lampiran 1. 6 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2011..... 81
Lampiran 1. 7 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2012..... 81
Lampiran 1. 8 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013..... 82
Lampiran 1. 9 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014..... 82
Lampiran 1. 10 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015..... 83
Lampiran 1. 11 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016..... 83
Lampiran 1. 12 Hasil Uji Data Panel dengan Fixed Effect Model ..... 84
Lampiran 1. 13 Hasil Uji Data Panel dengan Random Effect Model..... 85
Lampiran 1. 14 Hasil Uji Data Panel dengan Common Effect Model..... 86
Lampiran 1. 15 Hasil Pengujian Chow Test ..... 86
Lampiran 1. 16 Hasil Pengujian Chow Test ..... 86

# ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, pengeluaran pemerintah dan penduduk miskin terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2011-2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif . Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan cakupan wilayah 6 provinsi di pulau jawa pada periode 2011-2016. Penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Y) sebagai variabel dependent, sedangkan inflasi (X1), Penduduk Miskin (X2) , Pengeluaran Pemerintah (X3) dan Produk Domestik Regional Bruto (X4) sebagai variabel independen. Metode penelitian yang digunakan *random effect methode*.
Hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk miskin dan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan , pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan serta produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara bersama-sama inflasi , Produk domestik regional bruto , penduduk miskin dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.



**Kata Kunci** : *Indeks Gini, Inflasi, Penduduk Miskin, Pengeluaran pemerintah , Produk Domestik Regional Bruto*

## ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of inflation, gross Regional domestic product, government expenditure and total poor population to distribution of income inequality in Java at years 2011-2016. This research uses a quantitative approach. The data used in this research is secondary data obtained from the website of the Central Bureau of statistics (BPS) and the Directorate General of Financial Equalization (DJPK) with a coverage area of 6 provinces in Java island in the period of 2011-2016. This research uses 4 variables, those variables are distribution of income inequality (Y) as the dependent variable, while inflation (X1), poor population (X2), government expenditure (X3) and gross Regional domestic product (X4) as independent variables. The method of this research used random effect method. The results revealed poor population and inflation does not have significant impact to distribution of income inequality; Government expenditure has a positive and significant impact to distribution of income inequality. Gross regional domestic product has a negative and significant impact to distribution of income inequality. Collectively, the inflation, gross regional domestic product, poor population and Government expenditure have significant impact to distribution of imcome inequality.


**Keyword** : *Gini Ratio, Inflation, Poor Population, Goverment Expenditure, and Gross Domestic Regional Product*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang dengan disertai perbaikan sistem kelembagaan seperti ekonomi, sosial, budaya dan hukum (Arsyad, 2010) . Tetapi peningkatan pendapatan secara terus menerus dalam jangka panjang tidaklah cukup untuk menunjukkan bahwa pembanguan ekonomi dinegara tersebut berjalan dengan baik . Perlu adanya perbaikan struktur sosial, kelembagaan dan perilaku masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (Todaro, 2006) .

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan . Proses pembangunan ekonomi mempunyai tujuan yaitu peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok ; peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2006). Disamping itu , pembangunan ekonomi juga memliki banyak masalah dan kendala dalam pengimplementasiannya yaitu lebih memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan distribusi pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan suatu permasalahan yang dialami negara sedang berkembang dimana di daerah tertentu pertumbuhan

ekonominya tinggi dan cepat sedangkan di daerah lain justru berbanding terbalik dimana pertumbuhan ekonominya menurun atau melambat. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan sumber daya yang dimiliki. Investor lebih memillih daerah perkotaan yang memiliki fasilitas yang memadai seperti sarana-prasarana perhubungan , jaringan listrik, tenaga terampil dll. Selain itu adanya ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan dari pembagian pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang belum merata (Kuncoro, 2006).

Beberapa ekonom berpendapat bahwa kebijakan untuk memprioriatskan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sudah tidak bisa menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara sedang berkembang (Arsyad, 2010). Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan mengindikasikan bahwa negara tersebut belum berhasil dalam proses pembangunannya. Apabila perekonomian di negara tersebut berjalan dengan baik maka tingginya laju pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh selutuh pelaku ekonomi yang terlibat didalamnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat secara menyeluruh.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan dan perkembangan suatu kegiatan ekonomi dalam perekonomian suatu negara yang dapat menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masayarakat terus bertambah.Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu Tanah dan kekayaan alam lainnya ; Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja ;

Barang- barang modal dan tingkat teknologi ; serta Sistem sosial dan sikap masyarakat (Sukirno, 2010) .

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pencapaian nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut . PDRB dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh pembangunan yang telah berhasil menyejahterakan masayarakatnya. Berikut tabel PDRB pulau-pulau di Indonesia

**Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Pulau-Pulau di Indonesia**

| Pulau | Produk Domestik Regional Bruto ( milliar rupuah ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Sumatra | 1631727 | 1725536 | 1810953 | 1894170 | 1961071 | 2045251 |
| **Jawa** | **4182446** | **4448833** | **4716410** | **4979136** | **5251291** | **5544826** |
| Bali & Nusa tenggara | 213705 | 222155 | 235375 | 249269 | 275307 | 291516 |
| Kalimantan | 687807 | 727155 | 755866 | 781344 | 792047 | 807964 |
| Sulawesi | 386696 | 421671 | 454095 | 485290 | 525030 | 563977 |
| Maluku & Papua | 184534 | 190434 | 205123 | 214428 | 228046 | 245035 |
| Indonesia | 7287635 | 7727083 | 8156498 | 8564867 | 8982511 | 9433034 |

***Sumber : BPS 2016 , diolah***

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto dari 2011-2016 berada pada jalur yang postif tetapi besaran PDRB antar pulau belum merata. Pulau jawa sebagai pulau yang merupakan basis dari pusat pemerintahan dan perekonomian menunjukkan nilai PDRB paling besar di Indonesia . Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa selalu meningkat disetiap tahunnya . Pulau Jawa menyumbang sebesar 58.78 % dari PDB Nasional pada tahun 2016 . Besarnya presentase sumbangan tersebut masih banyak menimbulkan pemasalahan ekonomi yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dapat menggunakan indeks gini.

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata indeks gini Pulau Jawa dari 2011-2016 paling besar sebesar 0.3967 dibanding pulau lain di Indonesia. Tingginya rata-rata indeks gini selama 6 tahun terakhir tidak sesuai dengan tingginya Produk Domestik Regional Bruto di pulau tersebut di indonesia. Hal ini membuktikan bahwa di pulau jawa ditemukan permasalahan terkait tentang tingginya ketimpangan distribusi pendapatan dengan tingginya Produk Domestik Bruto Regional.

**Tabel 1. 2 Indeks Gini Pulau-Pulau Di Indonesia**

| Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulau Sumatra | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.3467 |
| **Pulau Jawa** | **0.38** | **0.4** | **0.39** | **0.41** | **0.4** | **0.4** | **0.3967** |
| Bali & Nusa Tenggara | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.375 |
| Kalimantan | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.3467 |
| Sulawesi | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.3933 |
| Maluku & Papua | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |

***Sumber : BPS 2016 , diolah***

Berdasarkan uraian penjelasan diatas adanya indikasi tentang ketidakmerataan distrribusi pendapatan di pulau Jawa. Untuk mendapatkan kajian empiris maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam serta komprehensif mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa. Maka penelitian tersebut berjudul **"Analisis Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2011-2016" .** Sehingga dari latar belakang tersebut maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka rumusan masalah dalam penilitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2011-2016 ?
2. Bagaimana pengaruh Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2011-2016 ?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2011-2016 ?
4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2011-2016 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa tahun 2011-2016.
2. Menganalisis pengaruh Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2011-2016.
3. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2011-2016.
4. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2016.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dalam penelitian ini yang dicapai antara lain adalah :

1. Bagi Penulis, menambah wawasan serta pengetahuan baru dan sebagai syarat memperoleh gelar S1 Jrusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bagi Masyarakat, untuk menambah pengetahuan agar dapat memahami mengetahui pengaruh inflasi , PDRB, pengeluaran pemerintah dan penduduk miskin terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.
3. Bagi Pengambilan Kebijakan, penelitia ini diharapkan dapat memberikan informasi pengaruh inflasi , PDRB, pengeluaran pemerintah dan penduduk miskin terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.
4. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan referensi dan informasi untuk pengembangan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

## 2.1 Kajian pustaka :

Sebagai referensi dan acuan untuk penelitian ini, maka terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dhyatmika & Atmanti (2013) menjelaskan bahwa terdapat pengklasifikasian daerah menurut tipologi klassen. Daerah yang berada pada klasifikasi daerah maju dan tumbuh cepat adalah Kota cilegon dan kota tangerang. Daerah yang berada pada klasifikasi daerah berkembang adalah kabupaten tangerang dan Daerah yang berada pada klasifikasi daerah tertinggal adalah kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Penanaman Modal Asing semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pembangunan. Penanaman modal asing yang tidak merata antar daerah mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan disetiap daerah dan masih menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di provinsi banten. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah semakin rendah tingkat ketimpangan pembangunan .Disisi lain Tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di provinsi banten.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nangarumba (2015) menjelaskan bahwa metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan regresi data

panel dengan model semi log. Penggunaan bentuk fungsional ini adalah dikarenakan data dependen yang digunakan berupa indeks, sehingga model semi log lebih tepat untuk digunakan. Hasil analisisnya menjelaskan bahwa PDRB dari Sektor Pertanian, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan juga Kredit Investasi berhubungan negatif dengan ketimpangan distribusi Pendapatan. PDRB sektor industri merupakan satu-satunya variabel yang berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Sehingga, jika yang ingin diwujudkan adalah pemerataan pendapatan maka diperlukan peningkatan kinerja sektor pertanian dan jasa, peningkatan upah minimum provinsi, peningkatan anggaran belanja modal, dan peningkatan kredit investasi.Berdasarkan nilai individual effect, Secara berturut-turut, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Maluku menjadi 3 daerah yang menerima pengaruh tertinggi, Dikarenakan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Maluku lebih berbasis pada sektor pertanian dan jasa yang memiliki kontribusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Sedangkan, untuk Provinsi DKI Jakarta memang memiliki PDRB Sektor Jasa yang lebih rendah dibandingkan sektor lainnya, namun Belanja Modal, Upah Minimum Provinsi, dan Kredit Investasinya merupakan yang tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia . Sedangkan untuk 3 wilayah dengan pengaruh yang terendah, dimiliki oleh Provinsi Papua, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Jawa Barat.Pada Provinsi Papua dari segi struktur ekonominya dikarenakan Provinsi tersebut memiliki sektor pertanian, industri, dan jasa yang lemah, selain itu kredit investasinya pun rendah, walaupun dengan tingkat upah dan belanja modal yang tinggi ternyata belum cukup untuk

mengurangi ketimpangan pendapatan pada daerah tersebut. Sedangkan pada Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Barat terkendala pada sektor industrinya terlalu dominan dibandingkan sektor pertanian dan jasa.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sunanda (2017) menjelaskan bahwa metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan Fixed Effect Model. Hasil penelitiannya PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sedangkan variabel jumlah penduduk dan IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan uji F , PDRB , jumlah penduduk dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sultan & Sodik (2010) menjelaskan bahwa analisis ini menggunakan indeks kesenjangan entropy theil dan analisis linier berganda. Hasil penelitianya adalah penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah. Pertumbuhan ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Susi Lestari (2016) menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan *panel data model* . Penelitian ini di lakukan di 38 kabupaten/kota provinsi jawa timur tahun 2008-2012.Hasil analisisnya yang telah diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk secara sendiri-sendiri berpengaruh

positif dan signifikant terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota provinsi jawa timur . sedangkan inflasi justru berpengaruh negatif dan signifikant terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota provinsi jawa timur . Jadi , pertumbuhan ekoomi dan jumlahpenduduk berbanding terbalik dengan inflasi pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota provinsi jawa timur. Hasil lainnya juga menunjukka ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota provinsi Jawa timur periode 2008-2012 sebesar 0,07 sampai 0,39 dan kota mojokerto, madiun, batu , pasuruan, dan blitar termasuk kota yang memiliki tingakt ketimpangan yang rendah . sedangakan kabupaten malang, jember, kediri, dan pasuruan termasuk daerah yang memiliki tingkat ketimpangan dpembangunan yang tinggi di provinsi Jawa Timur .

Penelitian yang telah dilakukan oleh Danawati dkk (2016) menjelaskan bahwa teknik analisis ini menggunakan metode analisis jalur dengan progaram AMOS. Cakupan data adalah kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2005-2013 dengan menggunakan data sekunder. Dalam pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan kesempatan kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tetapi di sisi lain pengeluaran pemerintah justru signifikant dan mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini berati semakin tinggi pengeluaran pemerintah semakin tinggi pula ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi, pengeluaran pemerintah belum bisa menjadi solusi dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarlan (2015) menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode eksplanatoris dengan data *time series* dan *cross section* dan mengaplikasian model persamaan simultan dengan menggunakan teknik regresi *two stage least square* (2SLS). Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan secara statistik. Pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap ketimpangan pendapatan. Tetapi kemiskinan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh pada kemiskinan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2018) menjelaskan bahwa PDRB Perkapita hasilnya positif dan signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan pengeluaran pemerintah hasilnya negatif dan signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Namun untuk penduduk miskin hasilnya tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.

## 2.2 Landasan Teori :

### 2.2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pembangunan ekonomi yang terintegrasi antar stakeholder baik dari pemerintah daerah , pihak swasta maupun masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan sumberdaya daerah tersebut yang dapat menghasilkan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru

sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang produktif dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut (Arsyad, 2010) .

Permasalahan yang sering terjadi di dalam pembangunan daerah adalah masih kurang dan minimnya pengoptimalan potensi yang terdapat di daerah tersebut misalnya potensi sumber daya manusia, kelembagaannya serta sumber daya fisik daerah tersebut (Arsyad, 2010). Proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti (Todaro, 2006) yaitu :

a. Pembagian ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan , sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
b. Peningkatan standar hidup. Peningkatan standar hidup tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja,dan perbaikan kualitas pendidikan.
c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial .

### 2.2.2 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan GDP/GNP tanpa melihat peningkatan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 2010). Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam yaitu faktor ekonomi dan nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumberdaya manusia , modal , usaha , teknologi dan sebagainya . tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial , kondisi

politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang . Berikut faktor ekonomi dan non ekonomi (Jhingan, 2000) :

1. Faktor Ekonomi

   a. Sumber alam.

      Disuatu negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah belum tentu bisa menjadi penunjang dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah harus bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk dapat mendukung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri . Ketika sumber daya alam tidak dikelola maka akan menjadi terbengkalai sehingga menjadi hambatan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi . Jadi dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup. Yang terpenting adalah pemanfaatannya secara tepat denga teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lebih lama .

   b. Akumulasi modal

      Modal berati persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu , hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukam modal. Proses pembentukan modal ini mempunyai sifat kumulatif dan terdiri dari tiga tahapan yang saling berhubungan yaitu a. Tabungan b. Lembangan keuangan dan lembaga kredit c. investasi barang modal . Proses pembentukan modal ini merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara . Pembentukan modal ini mempunyai dampak pada dua sisi dimana pada sisi

permintaan efektif dan disisi lain menciptakan efesiensi produktif untuk masa depan .

c. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan . Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal , buruh , dan membantu meningkatkan produktivitas. Jadi organisasi mencakup perusahaan swasta , pemerintah , bank , dan lembaga-lembaga internasional yang ikut terlibat dalam memajukan ekonomi suatu negara.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sbagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru . Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh , modal dan faktor produksi yang lain.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Adam smith menekankan pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi . pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh .Setiap buruh menjadi lebih efisien daripada sebelumnya .Ia menghemat waktu . Ia mampu menemukan mesin baru dan berbagai proses baru dalam berproduksi .

Akhirnya meningkatkan berbagai hal sehingga meningkatkan pertumbuhan eknomi pula .

2. Faktor Nonekonomi

a. Faktor sosial

Faktor sosial dan budaya juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara . Faktor ini memuncukkan pemikiran mengenai pendidikan dan kebudayaan barat yang menemukan penemuan baru sehingga memunculkan pemikiran baru yang visioner . Kekuatan faktor ini menumculkan berbagai dampaknya misalnya perubahan pandangan terhadap suatu hal , munculnya harapan baru , perubahan struktur dan nilai-nilai sosial sehingga orang dibiasakan untuk melakukan hal yang bersifat investasi dan akan mendapatkan laba dari investasi tersebut . Penduduk bermigrasi kedaerah perkotaan . Kebutuhan baru menjamur . Akibatnya sektor industri meluas lebih jauh. Kebebasan agama dan ekonomi kia mendorong perubahan pandangan dan nilai sosial . Unit keluarga terpisah menggantikan sistem keluarga bersama. hal ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi modern.

b. Faktor Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Penggunaan secara tepat sumber daya manusia untuk membangunan dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama , harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk. Sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan baik apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan dan diturunkan. Kedua , harus ada perubahan dalam pandangan tenaga buruh.

Perilaku sosial dari tenaga buruh merupakan hal yang penting di dalam proses pembanguna ekonomi. Untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas buruh . Hal ini memerlukan perubahan dalam faktor kelembagan dan sosial. Perubahan semacam ini tergantung pada penyebaran pendidikan. Hanya tenaga buruh yang terlatih dan terdidik dengan efisiensi tinggi yang akan membawa masyarakat kepaada pembangunan ekonomi yang pesat.

c. Faktor Politik dan Administratif.

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Administratif yang kuat , efisien, dan tidak korupsi .Dengan demikian amat penting bagi pembanguan ekonomi dan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

**1.) Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi Menurut Rostow** (Jhingan, 2000)**.**

1. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih mengalami keterbatasan dan masih relatif primitif dalam melakukan produksi yang didasarkan pada teknologi pra Newton dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional tetapi kebiasaan tersebut telah turun temurun. Menurut Rostow dalam suatu masyarakat tradisional , tingkat produktivitas per pekerja masih rendah . Oleh karena itu sebagian besar sumber besar sumber daya manusia digunakan untuk sektor pertanian.

2. Prasyarat Tinggal Landas

Prasyarat tinggal landas didefinisikan sebagai suatu keadaan bahwa masyarakat masih mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri . Pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis.

3. Tinggal Landas

Tinggal landas didefinisikan bahwa pada tahap ini masyarakat mengalami perubahan yang drastis seperti revolusi politik , teciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa tebukanya pasar-pasar baru . Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi Dan peningkatan investasi. Rostow mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai tahap tingal landas tidak satu sektor ekonomi yang baku untuk semua negara yang bisa menciptakan pembangunan ekonomi

4. Dorongan Menuju Kedewasaan

Dorongan menuju kedewasaan diartikan sebagai masa dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi . Pada tahap ini sektor-sektor pimpinan baru muncul menggantikan sektor-sektor pimpinan lama yang akan mengalami kemunduran.

5. Era Konsumsi Massa Besar-Besaran

Pada tahap ini didefinisikan bahwa masyarakat mulai melakukan dan memperhatikan permasalahan-permasalahan tentang konsumsi dan kesejahteraan masayarakat itu sendiri . Mereka tidak menekankan lagi terkait permasalahan produksi.

### 2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan (BI, 2018) .Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah yang diperoleh dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada pada suatu daerah oleh seluruh unit usaha .Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan gambaran atas nilai tambah barang dan jasa dengan perhitungannya menggunakan faktor harga periode sekarang atau saat ini sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan gambaran atas nilai tambah barang dan jasa dengan perhitungannya menggunakan faktor harga acuan sebagai tahun dasar(BI, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku mempunyai fungsi untuk mengetahui sebaran struktur ekonomi suatu wilayah pada suatu daerah sedangkan Produk Domestik Regional Bruto harga konstan mempunyai fungsi untuk mengetahui keunggulan dan kemampuan sumber daya suatu daerah dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil pada suatu daerah dan PDRB ini tidak terpengaruh pleh harga periode saat ini. (BI, 2018).

Perhitungan Produk Domestik regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendaatan (BPS, 2018b).

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha yaitu :

a. Pertanian, kehutanan dan perikanan,
b. Pertambangan dan penggalian
c. Industri pengolahan
d. Pengadaan listrik
e. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
f. Konstruksi
g. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
h. Transportasi dan pergudangan
i. Penyediaan akomodasi dan makan minum
j. Informasi dan komunikasi
k. Jasa keuangan dan asuransi
l. Real estate
m. Jasa perusahaan
n. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
o. Jasa pendidikan
p. Jasa kesehatan dan kegiatan lannya
q. Jasa lainnya

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk domestik regional bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
b. Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga
c. Pengeluaran konsumsi pemerintah
d. Pembentukan modal tetap domestik bruto
e. Perubahan inventori dan diskrepansi statistik
f. Ekspor barang dan jasa
g. Impor barang dan jasa

3. Pendekatan pendapatan

Produk domestik regional bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktro produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dala definisi ini , PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi)

### 2.2.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (BPS, 2018).

Inflasi sendiri dapat dibedakan menjadi empat jenis , yaitu inflasi ringan . Inflasi ini ketika kenaikan harganya masih pada posisi kurang dari 10% dalam setahun . Inflasi sedang, Inflasi ini ketika kenaikan harganya masih pada posisi antara 10%-30% dalam setahun. Inflasi berat, Inflasi ini ketika kenaikan harganya masih pada posisi antara 30%-100% dalam setahun dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali , Inflasi ini ketika kenaikan harganya melebihi 100% dalam setahun (Muhaimin, 2014) . Terdapat dua penyebab yang dapat meyebabkan terjadinya inflasi :

1. *Demand pull inflation,* faktor ini terjadi karena adanya kenaikan harga-harga yang terjadi karena adanya peningkatan pada sisi permintaan barang tetapi adanya peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan atau penambahan jumlah penawaran barang tersebut .(Sukirno, 2006). Sesuai dengan hukum permintaan bahwa jika permintaan suatu barang tinggi sedangkan penawaran akan barang tersebut tetap atau tidak ada peningkatan maka harga barang tersebut akan naik (Mankiw, Quah, & Wilson, 2012).
2. *Cost Push Inflation,* Faktor ini terjadi karena disebabkan oleh peningkatan biaya produksi suatu barang karena adanya peningkatan harga pada biaya input juga sehingga perusahaan untuk tetap menjaga keuntungannya maka harus menaikkan harga (Sukirno, 2006) . Hal ini menyebabkan terjadinya inflasi suatu barang (Mankiw et al., 2012).

Inflasi mempunyai dampak-dampak kepada individu atau masyarakat yaitu (Sukirno, 2010):

1. Inflasi dapat menyebabkan menurunnya pendapatan riil yang didapat seseorang yang mempunyai pendapatan tetap . Peningkatan harga-harga barang dan jasa secara bersama-sama tidak serta merta menaikkan pendapatan mereka. Oleh karena itu inflasi sangat berpengaruh terhadap pendapatan riil setiap orang .
2. Inflasi juga akan mempengaruhi nilai kekayaan yang berbentuk uang . Pengaruh tersebut bisa sampe mengurangi nilai uang tersebut karena hampir semua masyarakat menyimpang uangnya dalam bentuk simpanan bank , dan siampanan di lembaga-lembaga keuangan sehingga dengan adanya inflasi akan menurunkan nilai uang tersebut .

### 2.2.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian , yaitu teori makro dan teori mikro (Mangkoesoebroto, 1993).

1. Teori makro
   a. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

      Model ini dikemukakann oleh Musgrave dan Rostow . Mereka memberikan pandangan bahwa ada hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan proses tahapan pembangunan suatu daerah meliputi tahap awal , tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal ini besaran investai dari

pengelaran pemerintah sangat mempengaruhi pembangunan karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana untuk menunjang dalam hal pendidikan, kesehatan, transportasi dll . Pada tahap selanjutya atau tahap menengah , investasi dari pengeluaran pemerintah tetap berlangsung untuk menjaga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dari tahapan tinggal landas tetapi pada tahap ini peran swasta sudah sangat besar . Pada tahap lanjut , aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program pelayanan kesehatan masyarakat dsb.

b. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GNP . Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum , akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak djelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP , apakah dalam pengertian peetumbuhan secara relatif ataukah sevara absolut. Apabila yang dimaksud oleh Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif seperti teori Musgrave , maka hukm Wagner sebagai berikut : Dalam suatu perekonomian , apabila pendapatan per kapita meningkat , secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat . Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maji (USA, German ,Jepang) , tetapi hukum tersebut memberi dasar alan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas.

c. Teori Peacok dan Wiseman

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pngeluaran pemerintah juga semakin meningkat . Oleh karena itu , dalam keadaan normal , meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar . Apabila keadaan normal tersebut terganggu , misalnya karena adanya perang . maka pemeritah harus memperbesar pengeluarannya untuk mebiayai peraang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang .

2. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja . Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Sebagai contoh , misalnya pemerintah menetapkan akan membuat sebuah pelabuhan udara baru. Pelaksnaan pembuatan pelabuhan udara tersebut menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta , seperti semen , baja ,

alat-alat pengangkutan dan sebagainya . Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah sebagai berikut : penentuan permintaan dan penetuan tingkat output.

### 2.2.6 Kemiskinan

1.) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan itu mempunyai sifat yang muldimensional sehingga kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai macam aspek . Aspek-aspek tersebut meliputi aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer bahwa seseorang bisa dikatakan masuk kategori miskin jika dia itu mempunyai keterbatasan akan kepemilikan aset , pengetahuan , ketrampilan serta organsasi dan sosial politik. Sedangkan aspek sekunder bahwa seseorang masuk kategori miskin jika dia terbatas dalam hal akses informasi , sumber keuangan dan jaringan sosial . Aspek-aspek tersebut akan berdampak pada kondisi lingkungan yang kurang sehat, kondisi kesehatan tubuh yang kurang diperhatikan , akses pendidikan yang masih minim serta kandungan gizi tubuh yang masih kurang (Arsyad, 2010). Aspek primer dan aspek sekunder saling berhubungan satu sama lain. Jika terjadi perbaikan pada salah satu aspek maka akan mempenaguruhi aspek yang lain juga . sehingga kemiskinan itu sebenarnya orangnya . Banyak istilah mengenai kemiskina pedesaan maupun kemiskina perkotaan yang miskin bukan desa atau kotanya melainkan yang miskin adalah orangnya atau penduduk daerah tersebut (Arsyad, 2010).

2.) Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan yang umum digunakan adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad, 2010) .

1. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pendapatan dan kebutuhan seseorang. Kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar minimum merupakan salah satu faktor seseorang untuk dapat memenuhi hidup dengan layak. Jika pendapatan seseorang tidak dapat mencukupi kebutuhan minimumnya maka dia bisa disebut dengan orang miskin. Jadi , ukuran kemiskinan yaitu dengan melihat apakah seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum dengan pendapatannya yang didapatnya. Konsep kemiskinan ini dimana pendapatan minimun dapat mencukupi kebutuhan dasar minimumnya seperti sandang , pangan, dan papan yang layak (Arsyad, 2010).

Konsep ini terdapat kesulitan didalamnya yaitu penentuan mengenai jumlah tingkat kebutuhan dasar minimum dan komposisi yang mana kedua hal tersebut dipengaruhi tidak hanya oleh kebiasaan melainkan oleh faktor kemajuan negara tersebut , iklim , dan faktor ekonomi yang lain yang dapat mempengaruhinya (Arsyad, 2010).

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang sudah mempunyai pendapatan yang dapat mencukupi kebutuhan dasar minimum belum bisa dikatakan bahwa dia termasuk golongan tidak miskin . Ada anggapan dari ahli yang menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pendapatan yang dapat mencukupi kebutuhan dasar minimum bisa dikatakan miskin jika pendapatan tersebut jauh dibawah pendapatan masayarakat

sekitarnya. Keadaan ini terjadi karena penentuan oarang dikatakan miskin dilihat dari lingkungan dan keadaan sekitarnya daripada orang yang terkait tersebut.

Berdasarkan pemahaman ini bahwa garis kemiskinan akan mengalami peubahan karena tingkat pendapatan dan taraf hidup masyarakat juga ikut berubah. Hal ini memperbaiki pemahaman dari konsep kemiskinan absolut sehingga pemahaman ini menjelaskan bahwa kemiskian relatif lebih dinamis dan kemiskinan akan selalu ada (Arsyad, 2010) .

Permasalahan kemiskinan dapat dilihat dari segi aspek ketimpangan sosialnya. Ketimpangan pendapatan antar golongan semakin besar maka baik antara golongan atas dengan golongan bawah maka jumlah pnduduk miskin juga bertambah . Berdasarkan kriteria Bank Dunia , dijelaskan bahwa jika 40% jumlah penduduk pada suatu daerah mempunyai pendapatan terendah dengan menerima kurang dari 12% dari pendapatan nasional maka disebut dengan ketimpangan pendapatan yang sangat timpang . Yang kedua , jika 40% jumlah penduduk pada suatu daerah mempunyai pendapatan terendah dengan menerima 12-17% dari pendapatan nasional maka disebut dengan ketimpangan pendapatan sedang. Yang terakhir , jika 40% jumlah penduduk pada suatu daerah mempunyai pendapatan terendah dengan menerima melebihi 17% dari pendapatan nasional maka disebut dengan ketimpangan pendapatan rendah(Arsyad, 2010).

3.) Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2018b) .

4.) Head Count Index

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

5.) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan.

6.) Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

7.) Strategi dan Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan sebagai berikut (Arsyad, 2010) :

1. Pembangunan di Bidang Pertanian

Sektor di bidang pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan pnting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di indonesia . Ada tiga aspek yang memberikan kontribusi tinggi dalam proses pembangunan ekonomi terutama didaerah pedesaan. Kontribusi

tersebut meliputi adanya revolusi dan peningkatan penggunaan teknologi di bidang pertanian padi untuk pembangunan irigasi. Selain itu dari program yang diberikan oleh pemerintah guna meningkatkan jumlah produksi tanaman keras. Dan pembangunan di bidang pertanian ini sangat berdampak dan berperan mengurangi kemiskinan baik di jawa maupun diluar jawa malalui pembangunan di bidang pertanian di daerah-daerah transmigrasi yang dilakukan pemerintah (Arsyad, 2010).

2. Pembangunan Kualitas Sumberdaya Manusia

Pembangunan kualitas sumber daya manausia sangatlah penting untuk dapat mengurangi kemiskinan . Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan produktivitas mereka dalam kegiatan produktif . Pembangunan manusia juga bisa dilakukan dengan beebagai cara misalnya peningkatan kulaitas pendidikan , kesehatan , pelayanan gizi sehingga dapat mengurangi kemiskinan di indonesia (Arsyad, 2010).

3. Peranan lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat sangat berperan mengurangi kemiskinan di Indonesia . Preranan yang dapat diberikan lembaga tersebut adalah keterlibatan lembaga tersebut dapat menringankan biaya finansial dalam menerapkan program padat karya yang memfokuskan pada tenaga kerja sehingga bisa mengurangi kemiskinan (Arsyad, 2010) .

### 2.2.7 Ketimpangan Pendapatan

1.) Ketimpangan Ekonomi antar daerah

Ketimpangan pendapatan regional merupakan ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat pada suatu daerah dengan daerah lain. Ketidakmerataan tersebut disebabkan adanya perbedaan faktor yang terdapat dalam daerah tersebut. Faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya , fasilitas yang dimiliki , infrastruktur , keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya (Kuncoro, 2004) **.** Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara berkembang yaitu (Arsyad, 2010)

a. Peningkatan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan perkapita penduduk tersebut .
b. Faktor inflasi yang menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar dan pendapatan masyarakat juga ikut meningkat namun produksi barang dan jasa masih rendah .
c. Pembangunan setiap daerah yang belum merata
d. Masih dominannya investasi proyek-proyek yang memfokuskan pada padat modal sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah.
e. Masih rendah dan minimnya mobilitas sosial yang dilakukan penduduk disuatu daerah.
f. Penerapan suatu kebijakan tentang industri subsitusi impor yang berdampak pada meningkatnya harga-harga barang guna melindungi dan mempertahankan suatu usaha dari golongan kapitalis.

g. Nilai tukar negara berkembang dalam perdagangannya dengan negara yang sudah maju yang belum stabil dan semakin memburuk sehingga mengakibatkan tidak jelasnya permintaan negara-negara maju terhadap barang ekspor yang dilakukan oleh negara berkembang.

h. Mulai hilangnya industri yang berbasis kerajinan rakyat misalnya industri pertukangan , industri rumah tangga yang dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan intuk menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah seperti , Tingkat kemiskinan , Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) , Produk Domestik Regional Bruto , Struktur fiskal , dan konsumsi rumah tangga perkapita (Kuncoro, 2004) . Menurut Myrdal (1957) dalam Kuncoro, (2004) Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut seperti terkonsentrasinya kegiatan ekonomi disatu wilayah sehingga wilayah lain tidak optimal dalam melakukan kegiatan ekonomi , persebaran alokasi investor untur berinvestasi belum merata, perbedaan kondisi demografis dan sumber daya alam yang berbeda antarwilayah serta kurang optimalnya perdagangan barang dan jasa antar daerah .Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah akan mengakibatkan perbedaan tingakt kesejahteraan antar daerah.

2.) Koefisien Gini

Koefisien gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilaiya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi

berkisar antara 0.50-0.70 ; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49 dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara 0.25-0.35 (Arsyad, 2010)

3.) Hipotesis Kuznet

Simon Kuznet mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi , distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendaptan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik” karena perubahan longitudinal ( time series) dalam distribusi pendapatan misalnya koefisien gini (Arsyad, 2010) .

Menurut model lewis yang sudah dijelaskan bahwa pada tahapan pertumbuhan awal akan terpusat pada satu sektor dimana sektor industri modern yang mana industri tersebut memiliki lapangan kerja yang masih terbatas tetapi produktivitas dan upahnya yang tcukup tinggi. Kurva kuznet dapat dijelaskan oleh proses pertumbuhan yang saling berhubungan dari perluasan sektor industri modern dengan diikuti sudah berkemnganya perekonomian suatu negara dari perekonomian tradisional menuju perekonomian yang modern . Selain itu , dampak dari investasi di sektor pendidikan mungkin terlebih dahulu meningkat karena sektor industri moder sangat memerlukann sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terampil namun situasi ini aku mengalami penurunan karena terjadi peningkatan penawaran akan tenaga kerja terdidik dan sebaliknya tenaga kerja tidak terdidik mengalami penurunan. Jadi, meskipun kuznet tidak menerangkan secara detail bagaimana mekanisme terbentuknya kurva U-Terbalik tetapi secara prinsip hipotesis ini tetap konsisten dengan proses tahapan dalam berlangsungnya pembangunan ekonomi.. Beberapa ekonom pembangunan tetap

berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan Kuznet tidak dapat dihindari (Arsyad, 2010) .

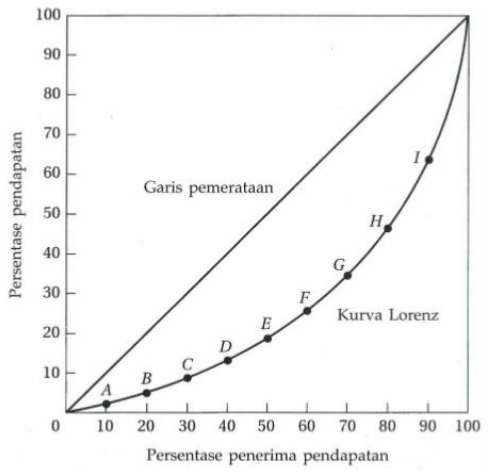
Kurva U-terbalik menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan yang meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun pada tahap-tahap berikutnya. Proses meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan bisa jadi merupakan akibat kebijakan di masa yang lalu yang mengasumsikan bahwa manfaat pembangunan pada akhirnya akan berdampak pada kaum miskin. Dengan asumsi ini pemerintah menerapkan kebijakan mengutamakan pertumbuhan ekonomi , dilakukan dengan mendorong pertumbuhan di daerah perkotaan , proses produksi berteknologi tinggi dan padat modal yang membawa konsekuensi berhentinya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri kecil yang seharusnya banyak yang menyerap tenaga kerja sehingga ketimpangan ketimpangan pendapatan meningkat. Konsekuensi ini disadari dan diperkirakan akan segera hilang karena setelah perekoomian sektor perkotaan dan industri besar tumbuh diharapkan akan mampu menyeret sektor pertanian dan sektor industri kecil yang banyak menyerap tenaga kerja untuk ikut tumbuh . Tetapi skenario ini ternyata tidak terwujud di banyak negara berkembang sehingga yang miskin tetap saja miskin dan yang kaya semakin hari semakin kaya (Hakim, 2002)

Distribusi aset dan pendapatan pada tahap awal pembangunan sangat berpengaruh dalam bentuk distribusi pendapatan di tahap-tahap berikutnya. Masyarakat yang memiliki properti memegang posisi penting dan mempunyai pendidikan yang baik pada awal pembangunan akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi di tahap-tahap

pembangunan berikutnya. Sebaliknya masyarakat yang miskin aset tidak punya posisi penting dalam perekonomian serta pendidikan yang kurang akan cenderung gagal meningkatkan pendapatannya pada tahap-tahap pembangunan berikutnya. Dengan demikian ketimpangan pendapatan pada tahap awal akan cenderung berlanjut pada tahap-tahap berikutnya .Dalam sebuah negara , negara yang ketimpangan distribusi pendapatannya kecil pada tahap awal pembangunan mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mempunyai ketimpangan distribusi yang merata pada tahap-tahap pembangunan berikutnya (Hakim, 2002) .

4.) Kurva Lorenz

Kurva lorenz pertama diperkenalkan oleh seorang ahli statistika dari Amerika Serikat yang bernama Conrad Lorenz. Ia menjelaskan bahwa ada hubungan antara jumlah penerima pendapatan dengan pangsa(share) pendapatan mereka (Arsyad, 2010).




**Gambar 2. 1 Kurva Lorenz**

Gambar 2.1 menunjukkan bagaimana cara membuat kurva lorenz seperti gambar diatas. Sumbu horisontal menjelaskan tentang jumlah penerima pendapatan dimana dalam bentuk presentase dan angka tersebut tidak dalam angka mutlak. Contoh , pada titik 20 menjelaskan 20% penduduk termiskin yang pendapatannya paling rendah . Sedangkan pada sumbu vertikal menjelaskan mengenai pangsa(share) pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh setiap presentase jumlah penduduk. Dan pada sumbu ini angkanya juga sampe 100% . Jadi sumbu vertikal dan horisontal sama panjangnya dan membentuk bujur sangkar.

Sebuah garis diagonal digambarkan pada bujur sangkar tersebut dimana garis diagonal tersebut menghubungkan antara titik origin menuju titik sudut kanan atas bujur sangkar tersebut. Garis diagonal tersebut menunjukkan bahwa besaran penerima pendapatan yang diterima sama persis dengan presentase penerima pendapatan. Misalnya , pada titik tengah garis diagonal tersebut menunjukkan angka 50% pendapatan diterima oleh 50% jumlah penduduk yang menerima. Jadi , garis tersebut disebut dengan garis kemerataan sempurna

Kurva lorenz menjelaskan bahwa ada hubungan antara presentase penduduk dengan presentase pendapatan yang mereka peroleh atau terima . Contoh pendapatan yang diterima selama 1 tahun , semakin jauh kurva lorenz dari garis diaogonal maka semkin tinggi tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan suatu daerah yang diperlihatkan dari gambar tersebut . Sebagai contoh , suatu keadaan jika pendapatan diterima oleh satu orang sajaa maka kurva tersebut akan menunjukka bahwa ada semakin melengkung kurva lorenz yang mengakibatkan

semakin berhimpitnya dengan sumbu vertikal bagian kanan dan sumbu horisontal bagian bawah.

5.) Beberapa kebijakan yang disarankan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yaitu (Hakim, 2002) :

1. Kapital dan Kredit

Di negara-negara berkembang para penduduk miskin hidup dari menjual tenaganya dan si kaya dari return kepemilikan properti mereka . kemiskinan penduduk miskin turut membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi seperti kemampuan untuk membeli varitas bibit baru, pupuk buatan, peralatan pertanian moderen atau mengirim anak-anak mereka ke sekolah yang bagus yang akan berujung pada kekalnya kemiskina mereka.

Upaya-uapaya pemerintah menyediakan kredit untuk kaum miskin tidak banyak berhasil karena berbagai hal , pertama , pinjaman meskipun pinjaman publik tetap saja memerlukan jaminan dan masyarakat miskin jarang yang bisa memenuhinya. Kedua, pinjaman yang tersalur kebanyakan macet karena kemampuan peminjam yang rendah dalam mengembalikan pinjaman. Ketiga , kredit bersubsidi sering kali tidak jatuh ke tangan kaum miskin akan tetapi lebih pada kelompok yang tidak seharusnya . Meskipun demikian terdapat beberapa contoh sukses dalam hal ini , misalnya program kredit the MicroFund di Filipina, Association for Development of Microenterprises di Republik Dominika, Badan Kredit Kecamatan di Indonesia , the Small Scale Enterprises Credit Program di Kalkuta atau Kupedes untuk paea pengusaha kecil di Indoensia.

2. Pendidikan dan Training

Investasi dalam pendidikan , investasi dan bentuk-bentuk human capital lainnya akan menghasilkan aliran pendapatan sepanjang waktu. Pendidikan dasar dan universal yang gratis merupakan jalan utama meredistribusi human capital untuk keuntungan bagi mereka yang relatif miskin.

3. Program Perluasan Kesempatan Kerja

Pengangguran ,fenomena besar di perkotaan negara-negara berkembang mempunyai pengaruh langsung pada distribusi pendapatan. Beberapa kebijakan telah dibuat untuk mengurangi pengangguran misalnya ekspansi industri , skema perluasan kesempatan kerja publik, produksi yang lebih padat karya di sektor manufaktur , pengurangan distorsi harga faktro produksi , pembangunan ekonomi dan jasa sosial yang lebih besar di daerah pedesaan , sistem pendidikan yang lebih relevan , konsistensi yang lebih tinggi antara kebijakan pendidikan dengan perencanaan ekonomi dan optimasi mekanisme pasar dalam penetuan tingkat harga dan upah.

4. Kesehatan dan Nutrisi.

Kondisi tidak sehat dan kekurangan makanan membatasi kesempatan para pekerja untuk memperoleh nafkah. Subsidi pangan dan kesehatan akan meningkatkan pendapatan kaum miskin, meningkatkan kesehatan dan nutrisi, memungkinkan orang untuk bekerja lebih lama dalam seharinya dan meningkatkan efektivitas kerjanya.

5. Riset dan Teknologi

Manfaat riset dan teknologi baru dalam mengurangi kemiskinan lebih tampak di pertanian. Pengenalan varrietas gandum dan padi unggul telah meningkatkan suplai makanan dan mengurangi harga makanan bagi kam miskin dan meningkatkan tingkat upah.

6. Migrasi

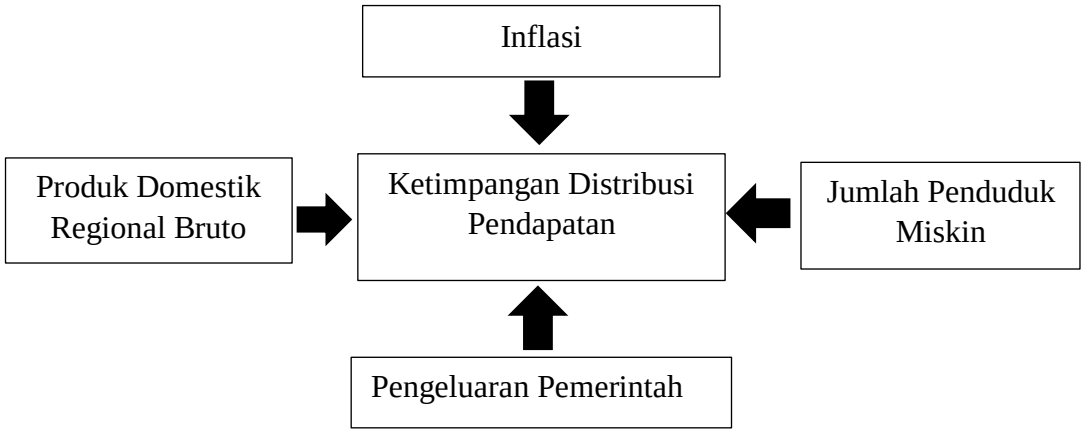
Proses pembangunan lebih banyak menciptakan pekerjaan sektor industri di perkotan sehingga orang-orang berpindah ke kota . Standar kehidupan migran tersebut meskipun rendah cenderung berada di atas teman-temannya yang miskin yang masih tinggal di pedesaan. Pada umumnya para pekerja kota mengirim uangnya ke rumah sehingga meningkatkan kesejahteraan kaum miskin di pedesaan. Yang harus dihindarkan adalah jumlah migrasi yang melebihi kapasitas sosial.

7. Tekanan pada kelompok Target

Stratergi yang lain untuk mengentaskan orang miskin adalah dengan mengarahkan program-program tertentu untuk kelompok-kelompok termiskin. India mempunyai lembaga pendidikan khusus untuk orang-orang terusir dan suku-suku terbelakang. Beberapa negara telah mencoba untuk memperbaiki tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan permpuan . Indonesia pada beberapa tahun terakhir memusatkan perhatian pembangunan pada kawasan indonesia timur yang merupakan bagian yang tertinggal dalam pembangunan.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian telaah penelitian sebelumnya dan kajian teori maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :




## 2.4 Hubungan Antar Variabel

### 2.4.1 Hubungan Inflasi dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan (BPS, 2018) . Inflasi secara keseluruhan menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penrunan . Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan jumlah barang yang dibeli akan menurun . Masyarakat yang pendapatannya kecil dan paling besar terkena dampak inflasi ini sehingga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan mereka. Akibatnya dapat memperlebar ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat .

### 2.4.2 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan (BI, 2018) .

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu sehingga Produk Domestik Regional Bruto dapat mencerminkan kemampuan suatu wilayah atau daerah untuk mengelola sumber daya yang tersedia sehingga antar daerah akan memiliki jumlah PDRB yang berbeda . Semakin besar potensi sumber daya yang tersedia semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada maka akan semakin besar PDRB wilayah tersebut.

Tinnginya PDRB menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dalam mengoptimalkan akan sumber daya yang dimiliki dan tersedia sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut.

Ini sesuai dengan Simon Kuznet (1955) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai , distribusi pendapatan akan makin tidak merata namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan makin merata (Kuncoro, 2006). Ekonom Universitas California, Deepak Lal menyatakan bahwa di berbagai negara , pertumbuhan ekonomi benar-benar telah menetas ke bawah. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi berhasil mengangkat kaum miskin untuk ikut menikmati

hasil pertumbuhan tersebut. Dengan demikian jika pertumbuhan ekonomi turun maka kemiskinan akan naik begitu sebaliknya dan akan berdampak meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan (Hakim, 2002) .Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makro ekonomi yang stabil sering dipandang sebagai pendekatan yang paling memuaskan , baik untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan maupun mengurangi kemiskinan. Sejumlah negara berpendapatan tinggi dan menengah seperti Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, dan Thailand telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat (Hakim, 2002).

### 2.4.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa , pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1993).

Pengamatan empiris oleh *Adolp Wagner* terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab dimaksud adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan ; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat ; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi ; perkembangan ekonomi ; perkembangan

demokrasi ; dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1996).

Pengaruh negatif pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan juga sesuai dengan pendapat Todaro, (2006) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat , pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik yaitu secara langsung berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dan secara tidak langsung melalui belanja subsidi ( subsidi pendidikan) , belanja hibah , belanja bantuan sosial (subsidi kesehatan) , belanja bantuan keuangan kepada prov/kab/kota dan pemdes dan belanja tidak terduga. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik akan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang berbeda pada setiap daerah akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan masyarakat .

### 2.4.4 Hubungan Penduduk Miskin dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan

Menurut Kincaid (1975) dalam Lincolin, (1999) kemiskinan dilihat dari dari aspek ketimpangan sosial dimana semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk miskin.

Penduduk miskin sangat berhubungan erat dengan situasi ketimpangan distribusi pendapatan. Penduduk miskin sangat memiliki keterbatasan dalam menjangkau fasilitas yang telah diberikan kepada masyarakat umumnya. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor misalnya akses ke lokasi sulit karena berada di pedalaman, faktor kurangnya pendidikan bagi masyarakat miskin, infrastruktur daerah yang kurang memadai. Hal ini merupakan satu kesatuan yang harus diperbaiki. Penduduk miskin cenderung kurang memiliki penghasilan yang tetap sehingga mereka kesulitas dalam memenuhi kebutuhan pokonya misalnya sandang, pangan, papan. Kebutuhan penting lainnya yang sulit terpebuhi yaitu pendidikan buat mereka. Rendahnya pendidikan yang diterima oleh penduduk miskin menyebabkan kualitas sumber daya manusia menjadi rendah . Rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan produktivitasnya menjadi rendah sehingga mereka kesulitas dalam mencari pekerjaan yang tetap atau pekerjaan di sektor formal. Dengan sulitnya kondisi ini , mereka kemudian mencari pekerjaan di sektor informal tetapi mereka terkendala dengan minimnya modal dan keterbatasan pengetahuannya. Dengan situasi ini mereka hanya bisa mendapatkan penghasilan yang rendah sehingga semakin memperbanyak jumlah penduduk miskin. Hal ini semakin memperlebar kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin dengan penduduk kaya . Ketika penduduk miskin semakin bertambah , semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah .

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan telaah penelitian terdahulu maka dapat diajukan beberapa hipotesis yaitu :

H1 : Inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan disribusi pendapatan di pulau jawa.

H2 : Penduduk Miskin berpengaruh positif terhadap ketimpangan disribusi pendapatan di pulau jawa.

H3 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap ketimpangan disribusi pendapatan di pulau jawa.

H4 : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan disribusi pendapatan di pulau jawa.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode jenis data kuantitatif. Data merupakan informasi yang akan diolah dan digunakan untuk membuktikan kebenaran dari sebuah teori. Oleh karena itu data harus valid, artinya ketepatan informasi, ketepatan pertanyaan dan kejujuran dari sebuah responden yang harus dipertimbangkan secara matang.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data tersebut. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data dalam penelitian ini diambil dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan , Website Badan Pusat Statistik, dan literatur-literatur lain yang bisa membantu proses penelitian ini. Data yang diambil oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini merupakan data panel dari 6 provinsi di Pulau Jawa.

## 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

### 3.2.1 Variabel Dependen

Indeks Gini (Y) didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat

ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Perhitungan indeks gini ini berasal dari 6 provinsi di Pulau Jawa.

### 3.2.2 Variabel Independen

1. Inflasi (X1)

   Meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum secara terus menerus dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Inflasi ini diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) . Data inflasi ini dari 6 provinsi di pulau Jawa dan diperoleh dari Badan Pusat Statistika.

2. Produk Domestik Regional Bruto (X2)

   Produk Domestik Regional Bruto pada penelitian ini menggunakan Produk domestik regional bruto harga konstan 2010. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

3. Penduduk Miskin (X3)

   Presentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) . Data penduduk miskin diperoleh dari Badan Pusat Statistika.

4. Pengeluaran Pemerintah (X4)

   Penegeluaran pemerintah adalah kewajiban yang harus di bayar oleh pemerintah di masing-masing provinsi di pulau jawa baik oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam jangka waktu satu tahun anggaran.. Data pengeluaran pmerintah ini dari 6 Provinsi di Pulau Jawa dengan satuan ukuran Rupiah. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berikut ini persamaan regresi liner berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$\{Y=\beta o+\beta_1 X_1+\beta_2 \log X_2+\beta_3 \log X_3 + \beta_4 \log X_4 + e\}$

| | |
|---|---|
| Y | = Indeks Gini |
| $X_1$ | = Inflasi |
| $X_2$ | = Produk Domestik Regional Bruto |
| $X_3$ | = Penduduk Miskin |
| $X_4$ | = Pengeluaran Pemerintah |
| $\beta o$ | = Konstanta Regresi |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ | = Koefisien Regresi |
| e | = Kesalahan Pengganggu |

### 3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode model Data panel (Pooled Data) . Data panel sendiri adalah gabungan antara data rentang waktu (time series) dan Data antar/lintas unit (cross section ). Dengan menggunakan data panel peniliti akan di mudahkan dan di untungkan dalam menganalisis Data (Sriyana, 2014), keuntungan tersebut yaitu:

a. Jumlah observasi data yang besar
b. Meningkatnya derajat bebas
c. Berkurangnya kolineritas antar variabel-variabel penjelas
d. Meningkatnya efisiensi dari penafsiran ekonometris
e. Estimasi parameter lebih stabil

Dalam menafsirkan model data panel terdapat 3 model yang dapat digunakan yaitu:

### 3.3.1 Common Effect Metode

Model ini merupakan model data panel dengan gabungan data time series dengan data crosss section. Pada model common effect ini diasumsikan bahwa perilaku perusahaan semua sama dalam periode waktu tertentu Setelah menggabungkan *cross-section* dan *time series* kemudian menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Sriyana, 2014) .

### 3.3.2 Metode Fixed Effect ( FEM )

Fixed effect Model adalah suatu regresi yang menunjukkan perbedaan konstanta antar obyek , dua asumsi yang ada dalam model regresi (fixed effect) adalah (Sriyana, 2014) :

a. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit Intersep pada suatu hasil regresi sangat mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu, pada pendekatan (fixed effect) metode dapat dilkukan dengan variable semu (dummy) untuk menjelaskan adanya perbedaan anatr intersep. Model ini dapat di regresi dengan teknik least squares dummy variabels (LSDV)
b. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu/unit dan antar periode waktu, Pendekatan dari metode estimasi regresi data panel ini adalah asumsi tentang intersep yang berubah baik antar individu abyek analisis maupun anatr waktu, namun slope masih diasumsikan konstan/sama.

### 3.3.3 Metode Random Effect ( REM )

Model ini lebih dikenal sebagai model generalized least squares (GLS).model ini di asumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta disebabkan residual / error sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara random . Karena hal inilah, model efek acak (random effect) sering juga disebut model komponen error (error component model)(Sriyana, 2014).

Dua asumsi yang di gunakan dalam model Random effect ( REM ) adalah :

1. Intersep dan slope berbeda antar individu, pada asumsi ini intersep dan slope yang di analisis hanya dilihat dari perbedaan antar obyek antar individu saja, adanya perbedaan intersep dan koefisien regresi berdasarkan perubahan waktu masih dikesampingkan
2. Intersep dan slope berbeda antar individu/unit dan periode waktu, asumsi ini menjelaskan adanya perbedaan hasil estimasi intersep dan slope yang di analisis terjadi karena perbedaan antar obyek individu analilsis sekaligus karena adanya perubahan antar periode waktu.

   Persamaan model random effect adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it}^{j} + u_{it} \rightarrow u_{it} = u_i + v_t + w_{it}$$

i = 1,....,N

t = 1,.....,K

## 3.4 Pemilihan Model

Sebelum melakukan pembahasan mengenai hasil model regresi panel data, maka akan dilakukan pemilihan model terbaik yang akan digunakan sebagai dasar melakukan analisis. Dalam pemilihan model dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Chow-test adalah pengujian untuk memilih common effect atau Random effect
b. Uji Hausman digunakan untuk memilih fixed effect atau random effect

### 3.4.1 Chow Test

Pada chow test, pengujian F-statistik merupakan uji perbedaan dua regresi, pengujian dilakukan untuk memilih metode manakah yang digunakan oleh model pooled least square dan fixed effect. Pada setiap unit cross section memiliki pelaku yang sama akan tetapi kecenderungannya tidak realistis karna di setiap unit cross section juga memiliki pelaku yang bebeda. Dengan pengujian ini, Apakah teknik fixed effect lebih baik dari pada model data panel yang tidak mengandung variabel dummy, itu dapat dilihat dengan metode residual sum of squares (RSS). Dalam pengujiannya dengan metode ini, terdapat hipotesanya sbb:

$H_0$ : memilih model estimasi common effect

$H_1$ : memilih model estimasi Fixed Effect

Apabila ketika melakukan pengujian dengan uji chow test hasilnya menujukkan bahwa probabilitas cross section chi square lebih kecil dari $\alpha$ = 1%, 5%, 10% . maka model yang dipilih adalah fixed effect model begitu juga sebaliknya .

### 3.4.2 Hausman Test

Hausman test merupakan pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan untuk memilih apakah menggunakan model fixed effect atau random effect. Ada dua hal sebagai dasar pertimbangan yaitu, (1) ada tidaknya korelasi antara error terms dan variabel independen X. Jika diasumsikan memiliki korelasi antar error terms dan variabel independen X maka model random effect lah yang lebih tepat, dan sebaliknya, (2) jika sampel yang diambel hanya bagian kecil dari populasi maka eror terms yang kita dapatkan bersifat random sehingga model random effect lebih tepat. Hausman test didasarkan pada ide bahwa LDSV di dalam fixed effect dan GLS dimana GLS efisien sedangkan OLS tidak Efisien dan sebaliknya. Karena itu hausman test dapat dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Test dilakukan dengan hipotesa :

$H_0$ : memilih model estimasi random effect

$H_1$ : memilih model estimasi Fixed Effect

Apabila ketika melakukan pengujian dengan uji hausman test hasilnya menujukkan bahwa probabilitas cross section random lebih kecil dari $\alpha$ = 1%, 5%, 10% . maka model yang dipilih adalah fixed effect model begitu juga sebaliknya (Widarjono, 2016).

## 3.5 Uji Statistik

### 3.5.1 Koefisien Determinasi ($R^2$)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik garis regresi cocok dengan datanya atau mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi

karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik (Widarjono, 2016).

Nilai $R_2$ menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai $R_2$ berkisar antara 0 dan 1 ( $0 < R_2 < 1$). Semakin besar nila $R_2$ maka semakin besar variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya semakin kecil nilai $R_2$ , maka semakin kecil variasi variabel depnden yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (Widarjono, 2016).

Apabila $R_2$ bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nila R2 maka semakin dapat garis regresi dalam menggunakan nilai observasi (Widarjono, 2016).

### 3.5.2 Uji Statistik t

Uji t merupakan pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari t hitung dengan t tabel atau dapat juga dilakukan dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan tertentu.

$H_0 : \beta > 0$ , artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

$H_1 : \beta \leq 0$ , artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Jika t hitung < t tabel, maka $H_0$ diterima dan $H_1$ ditolak artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan sebaliknya jika t hitung > t tabel maka $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan (Widarjono, 2016).

Bila dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan 5% maka bila probabilitas <0.05, berarti variabel indepnden berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya bila probabiltas > 0.05 berarti independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Widarjono, 2016).

### 3.5.3 Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta > 0$ , artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

$H_1 : \beta \leq 0$ , artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Jika F hitung < F tabel , maka $H_0$ diterima dan $H_1$ ditolak. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya , jika F hitung >F tabel, maka $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima . Hal ini berarti secar bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Bila dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan 5% maka bila probabilitas < 0.05 berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel

dependen secara signifikan. Sebaliknya bila probabilitas > 0.05 maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempenagruh variabel terhadap variabel dependen secara signifikan (Widarjono, 2016).

# BAB IV

# HASIL DAN ANALISIS

## 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data time series dan cross section. Dengan periode pengamatan antara tahun 2011-2016, dengan mencakup 6 Provinsi di Pulau Jawa meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Data variabel dependen yang digunakan adalah Indeks Gini (Y), sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Inflasi (X1). Jumlah Penduduk Miskin (X2), Pengeluaran Pemerintah(X4) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X4).

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pencapaian nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut . PDRB dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh pembangunan yang telah berhasil menyejahterakan masyarakatnya. Dalam setiap tahunnya dari tahun 2011-2016 Produk Domestik Regional Bruto selalu mengalami pertumbuhan. Berikut tabel PDRB pulau-pulau di Indonesia

**Tabel 4. 1 Produk Domestik Regional Bruto Pulau-Pulau di Indonesia**

| Pulau | Produk Domestik Regional Bruto ( milliar rupuah ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Sumatra | 1631727 | 1725536 | 1810953 | 1894170 | 1961071 | 2045251 |
| **Jawa** | **4182446** | **4448833** | **4716410** | **4979136** | **5251291** | **5544826** |
| Bali & Nusa tenggara | 213705 | 222155 | 235375 | 249269 | 275307 | 291516 |
| Kalimantan | 687807 | 727155 | 755866 | 781344 | 792047 | 807964 |
| Sulawesi | 386696 | 421671 | 454095 | 485290 | 525030 | 563977 |
| Maluku & Papua | 184534 | 190434 | 205123 | 214428 | 228046 | 245035 |
| Indonesia | 7287635 | 7727083 | 8156498 | 8564867 | 8982511 | 9433034 |

***Sumber : BPS 2016 , diolah***

Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto dari 2011-2016 berada pada jalur yang postif tetapi besaran PDRB antar pulau belum merata. Pulau jawa sebagai pulau yang merupakan basis dari pusat pemerintahan dan perekonomian menunjukkan nilai PDRB paling besar di Indonesia . Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa selalu meningkat disetiap tahunnya . Pulau Jawa menyumbang sebesar 58.78 % dari PDB Nasional pada tahun 2016 . Besarnya presentase sumbangan tersebut masih banyak menimbulkan pemasalahan ekonomi yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dapat menggunakan indeks gini.

Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata indeks gini Pulau Jawa dari 2011-2016 paling besar sebesar 0.3967 dibanding pulau lain di Indonesia. Tingginya rata-rata indeks gini selama 6 tahun terakhir tidak sesuai dengan tingginya Produk Domestik Regional Bruto di pulau tersebut di indonesia. Hal ini membuktikan bahwa di pulau jawa ditemukan permasalahan terkait tentang tingginya ketimpangan distribusi pendapatan dengan tingginya Produk Domestik Bruto Regional.

**Tabel 4. 2 Indeks Gini Pulau-Pulau Di Indonesia**

| Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulau Sumatra | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.3467 |
| **Pulau Jawa** | **0.38** | **0.4** | **0.39** | **0.41** | **0.4** | **0.4** | **0.3967** |
| Bali & Nusa Tenggara | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.375 |
| Kalimantan | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.3467 |
| Sulawesi | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.3933 |
| Maluku & Papua | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |

***Sumber : BPS 2016 , diolah***

## 4.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

### 4.2.1 Common Effect Model (CEM)

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Data Panel dengan Common Effect Model**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | -7.77E-15 | 2.27E-15 | -3.419.704 | 0.0018 |
| INF? | -2.27E-17 | 3.59E-17 | -0.632076 | 0.532 |
| IG? | 1.000.000 | 4.85E-15 | 2.06E+14 | 0 |
| LOG(PDRB?) | 0 | 2.66E-16 | 0 | 10.000 |
| LOG(PP?) | 0 | 2.66E-16 | 0 | 10.000 |
| R-Squared | 1.000.000 | | | |
| F-Statistic | 1.99E+28 | | | |
| Prob(F-Statistic) | 0 | | | |

***Sumber : pengolahan Eviews 9***

### 4.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Data Panel dengan Fixed Effect Model**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.289123 | 0.953168 | 0.303329 | 0.7641 |
| INF? | 0.001243 | 0.001327 | 0.937136 | 0.3573 |
| PM? | 0.00011 | 0.006218 | 0.017701 | 0.986 |
| LOG(PDRB?) | -0.016518 | 0.096894 | -0.170479 | 0.866 |
| LOG(PP?) | 0.019788 | 0.027079 | 0.730774 | 0.4715 |
| Fixed Effects (Cross) | | | | |
| _Banten--C | -0.002064 | | | |
| _Jabar--C | 0.00824 | | | |
| _Jakarta--C | 0.00489 | | | |
| _Jateng--C | -0.022901 | | | |
| _Jatim--C | -0.012397 | | | |
| _Yogya--C | 0.024232 | | | |
| R-Squared | 0.65335 | | | |
| F-Statistic | 5.444.845 | | | |
| Prob(F-Statistic) | 0.000319 | | | |

***Sumber : pengolahan Eviews 9***

### 4.2.3 Random Effect Model (FEM)

Hasil dari uji regresi data panel dengan menggunakan metode *random effect* model sebagai berikut :

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Data Panel dengan Random Effect Model**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.411285 | 0.103556 | 3.971.632 | 0.0004 |
| INF? | 0.001093 | 0.001169 | 0.934438 | 0.3573 |
| PM? | -0.000923 | 0.001455 | -0.634306 | 0.5305 |
| LOG(PDRB?) | -0.031678 | 0.009708 | -3.262.908 | 0.0027 |
| LOG(PP?) | 0.025315 | 0.009876 | 2.563.160 | 0.0154 |
| Random Effects (Cross) | | | | |
| _Banten--C | -0.007712 | | | |
| _Jabar--C | 0.011076 | | | |
| _Jakarta--C | 0.002839 | | | |
| _Jateng--C | -0.010974 | | | |
| _Jatim--C | 1.65E-05 | | | |
| _Yogya--C | 0.004754 | | | |
| R-Squared | 0.306567 | | | |
| F-Statistic | 3.426.273 | | | |
| Prob(F-Statistic) | 0.019741 | | | |

***Sumber : pengolahan Eviews 9***

## 4.3 Pemilihan Model dalam Pengolahan data

Pemilihan model ini sangat diperlukan untuk menentukan model mana yang terbaik berdasarkan pengujian secara statistik , guna menemukan dugaan yang tepat sesuai dengan teori . Sehingga diperlukan untuk melihat model yang ada dalam data panel seperti yang ada di bawah ini:

### 4.3.1 Chow Test (Uji F-Statistik)

Uji chow test berfungsi untuk menentukan model mana yang cocok digunakan antara estimasi Common Effect Model atau Fixed Effect Model dengan uji hipotesis sebagai berikut :

a. Ho : memilih model estimasi Common Effect

b. H1 : memilih model estimasi Fixed Effect

Uji F-statistik ini akan dianalisis dengan melihat nilai probabilitas F-statistik. Apabila probabilitas F-statistik tidak signifikan atau α > 10% maka model yang tepat untuk dipilih adalah estimasi Common Effect Model . Sebaliknya , jika nilai probabilitas F-Statistik signifikan atau α < 10% , maka model yang diplih adalah model estimasi Fixed Effect.

**Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Chow Test**

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|---|---|---|---|
| Cross-section F | 2.589.868 | (5,26) | 0.0498 |
| Cross-section Chi-square | 14.549.951 | 5 | 0.0125 |

***Sumber : Eviews 9 , diolah***

Dari hasil uji pengujian *chow test* diperoleh hasil nilai distribusi chi-square adalah sebesar 14.549951 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0125 < α = 10% , artinya menolak Ho dan memilih $H_1$. Hal tersebut menunjukkan bahwa model estimasi yang dipilih adalah model *Fixed Effect.*

### 4.3.2 Uji Hausman

Uji ini berfungsi untuk menentukan model mana yang cocok digunakan antara estimasi Fixed Effect Model atau Random Effect Model dengan uji hipotesis sebagai berikut :

a. Ho : memilih model estimasi Random Effect

b. H1 : memilih model estimasi Fixed Effect

Uji hausman akan dianalisis dengan melihat nilai probabilitas Chi square Statistic . Apabila probabilitas Chi Square Statistic atau α > 10% , maka model yang dipilih adalah model estimasi Random Effect . Sebaliknya , jika nilai

probabilitas Chi Square Statistic signifikan atau α < 10% , maka model yang tepat untuk dipilih adalah estimasi Fixed Effect Model.

**Tabel 4. 7 Hasil Uji hausman**

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|---|---|---|---|
| Cross-section random | 2.885.501 | 4 | 0.5772 |

***Sumber : Eviews 9 , diolah***

Dari hasil uji Hausman diperoleh hasil nilai chi-square adalah sebesar 2.885501 dengan nilai probabilitas sebesar 0.5772 > α = 10% , artinya menerima $H_o$ dan menolak $H_1$. Hal tersebut menunjukkan bahwa model estimasi yang tepat untuk dipilih adalah menggunakan Random Effect Model .

## 4.4 Hasil Pengujian statistik

Berdasarkan hasil uji spesifikasi model dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman dihasilkan bahwa hasilnya memilih Random Effect Model.

**Tabel 4. 8 Hasil Estimasi Random Effect Model**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.411285 | 0.103556 | 3.971.632 | 0.0004 |
| INF? | 0.001093 | 0.001169 | 0.934438 | 0.3573 |
| PM? | -0.000923 | 0.001455 | -0.634306 | 0.5305 |
| LOG(PDRB?) | -0.031678 | 0.009708 | -3.262.908 | 0.0027 |
| LOG(PP?) | 0.025315 | 0.009876 | 2.563.160 | 0.0154 |
| Random Effects (Cross) | | | | |
| _Banten--C | -0.007712 | | | |
| _Jabar--C | 0.011076 | | | |
| _Jakarta--C | 0.002839 | | | |
| _Jateng--C | -0.010974 | | | |
| _Jatim--C | 1.65E-05 | | | |
| _Yogya--C | 0.004754 | | | |
| R-squared | 0.306567 | | | |
| F-statistic | 3.426.273 | | | |
| Prob(F-statistic) | 0.019741 | | | |

***Sumber : eviews 9 , diolah***

### 4.4.1 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi variable dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen , untuk penelitian kali ini koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel dependen yaitu Indeks Gini (IG) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Inflasi (X1) , Jumlah Penduduk Miskin (X2) , pengeluaran pemerintah (X3) dan PDRB (X4)

Dari hasil akhir regresi model *Random Effect* diperoleh nilai $R^2$ sebesar 0,306577 artinya bahwa variabel dependen Indeks Gini dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu inflasi ,penduduk miskin, pengeluaran pemerintah, dan PDRB sebesar 30,66 % dan sisanya sebesar 69,34% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model .

### 4.4.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individu ( Uji t)

Pengujian signifikansi parameter individu merupakan uji signifikansi untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen , apakah masing-masing variabel independen signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen dapat dilihat pada pengujian ini.

Pengujian signifikansi masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap Variabel Inflasi
    a. H0 : $\beta i > 0$ , artinya Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
    b. H1 : $\beta i \leq 0$, artinya Inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Dari hasil regresi *Random Effect* ( Tabel 4.3) dengan taraf signifikansi 10% (α = 10%), bahwa inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3573 > α=10% dengan t-hitung sebesar 0.934438, artinya menerima H0 atau menolak H1. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.

2. Pengujian terhadap Variabel Penduduk Miskin (PM)
   a. H0 : βi > 0 , artinya penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
   b. H1 : βi ≤ 0, artinya penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

   Dari hasil regresi *Random Effect* ( Tabel 4.3) dengan taraf signifikansi 10% (α = 10%), variabel Jumlah Penduduk Miskin (PM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5305 > α = 10% dengan t-hitung sebesar -0.634306, artinya menerima H0 atau menolak H1. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.

3. Pengujian terhadap Variabel Pengeluaran Pemerintah (PP)
   a. H0 : βi > 0 , artinya Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
   b. H1 : βi ≤ 0, artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

   Dari hasil regresi *Random Effect* ( Tabel 4.3) dengan taraf signifikansi 10% (α = 10%), variabel jumlah pengeluaran pemerintah (PP) memiliki nilai

probabilitas sebesar 0.0154 < α=10% dengan t-hitung sebesar 2.563160. artinya menolak $H_1$ atau menerima $H_0$. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa

4. Pengujian terhadap Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .
   a. H0 : βi > 0 , artinya variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
   b. H1 : βi ≤ 0, artinya variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

   Dari hasil regresi *Random Effect* ( Tabel 4.3) dengan taraf signifikansi 10% (α = 10%), variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0027 < α=10% dengan t-hitung sebesar -3.262908 , artinya menolak H0 atau menerima H1.Secara statistik menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.

### 4.4.3 Pengujian Signifikansi Simultan ( Uji F)

Uji signifikansi secara simultan ( uji F) merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen . F-hitung pada regresi *Random Effect* ( Tabel 4.3) menunjukkan nilai sebesar 3.426273 dengan probabilitas sebesar 0.019741 < α = 10% . Artinya bahwa variabel independen yaitu Inflasi (X1), Penduduk Miskin (X2) , Pengeluaran Pemerintah (X3), dan PDRB (X4) secara

bersama-sama signifikant mempengaruhi variabel dependen yaitu keimpangan distribusi pendapatan ( IG)

## 4.5 Interpretasi Hasil dan Analisis

### 4.5.1 Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil estimasi *Random Effect* (Tabel 4.3) inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,3573 > α = 10%.. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini karena inflasi bersifat fluktuatif dan pada bulan Februari 2015 setiap provinsi mengalami deflasi. Hal tersebut terjadi karena turunnya harga pada 3 komoditas , seperti pada bulan Februari 2015 PT.PLN melakukan penurunan tarif listrik sebagai mekanisme penyesuain (tarif adjustment) untuk 12 golongan pelanggan termasuk pelanggan rumah tangga dengan daya 1300 VA, 2200 VA, 3500VA s.d 5500 VA dan 6600VA keatas ; Penurunan tarif batas atas dan tarif batas bawah pengguna jasa angkutan udara kelas ekonomi jadwal dalam negeri sebesar 5% keputusan tersebut tertuang dalam PERMENHUB No. PM 14 tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan berlaku selama 30 hari sejak permenhub 14 dikeluarkan pada 28 Januari 2016 lalu ; Komoditi bensin jenis pertamax, pertamax plus dan pertalite mengalami penurunan harga per tanggal 5 Februari 2015. Pertamax – dari harga

Rp 8450 menjadi Rp 8250/ltr .Pertamax Plus – dari harga Rp 9350 menjadi Rp 9150/ltr. Pertalite- dari harga Rp 7800 menjadi Rp 7600/ltr.

Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami inflasi yang signifikan dimana penyebab utamanya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan premium menjadi Rp 6500/liter dan solar Rp 5500/liter. BBM memberi andil atas inflasi sebesar 1.17%. Kenaikan harga BBM juga membuat harga beberapa komoditas lainnya merangkak naik seperti tarif angkutan dalam kota memberikan andil inflasi 1.75% .

### 4.5.2 Analisis Pengaruh Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

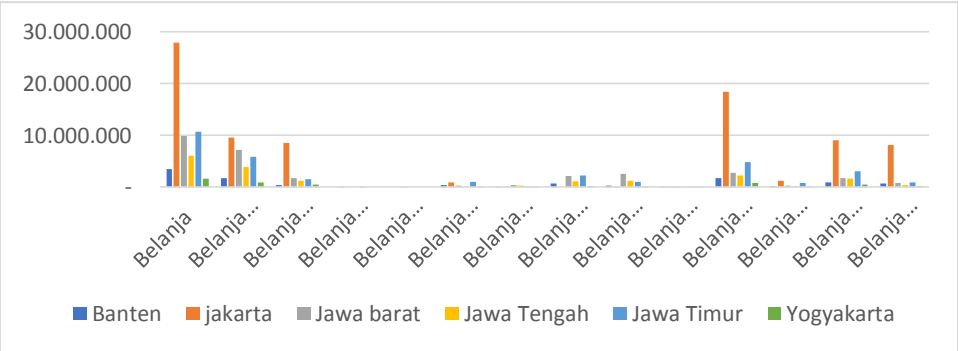
Dari hasil estimasi *Random Effect* (Tabel 4.3) penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.5305 > ( $\alpha$ =10%), artinya menolak $H_1$ atau menerima $H_0$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Kesimpulan ini menjelaskan bahwa tolak ukur kemiskinan tidak hanya diukur dari presentase penduduk miskin. Badan Pusat Statistik menggunakan tiga indikator kemiskinan yaitu *Head Count Index* yaitu presentasi jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan. *Poverty Gap Index* yaitu ukuran rata-rata kesenjangan rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. *Proverty Security Index* adalah gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin (BPS, 2018). Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Sudarlan, (2015) yang menjelaskan bahwa kemiskinan tidak

mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel kemiskinan yang terdiri dari Head Count Index, Poverty gap Index dan Proverty Security Index. Penelitian dari (Wicaksono, 2018) juga menjelaskan bahwa penduduk miskin tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di sulawesi selatan tahun 2011-2015. Penurunan presentase penduduk miskin di pulau jawa dari tahun 2011-2015 dipengaruhi oleh inflasi umum yang relatif rendah ; perekonomian stabil dan perbaikan penghasilan petani mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) (BPS, 2018a).

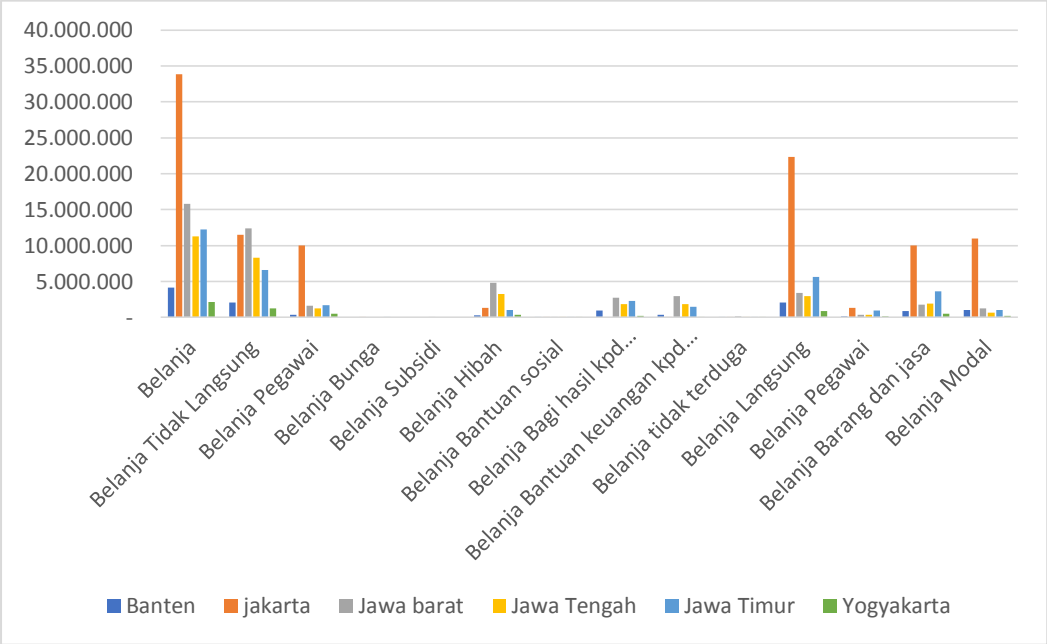
### 4.5.3 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil estimasi *Random Effect* (Tabel 4.3) pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dilihat dari koefisien pengeluaran pemerintah sebesar 0.037334 , artinya bahwa apabila pengeluaran pemerintah naik 1% maka ketimpangan distribusi pendapatan naik sebesar 0.037334 % . Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa pengeluaran pmerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Danawati dkk (2016) dan Wahyuni dkk (2014) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dengan ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi bali . Jadi semakin besar pengeluaran pemerintah semakin tinggi pula ketimpangan distribusi pendapatan .

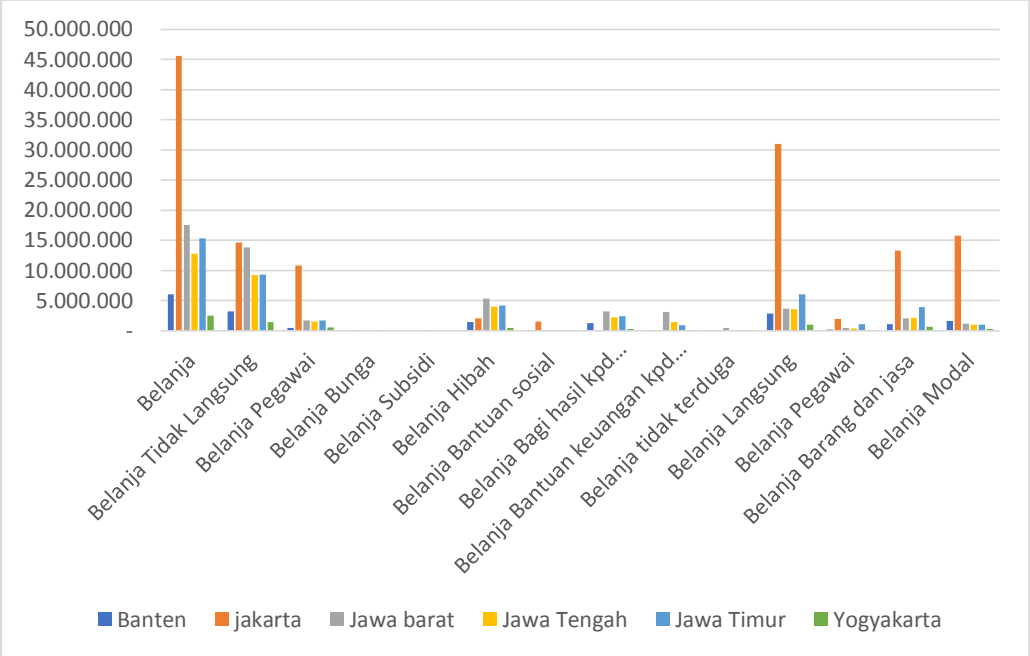
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa besaran pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan . Hasil ini disebabkan karena kebijakan pengeluaran pemerintah yang dilakukan pemerintah belum optimal dalam pengalokasiannya untuk menangani masalah ketimpangan pendapatan . Meskipun pengeluaran pemerintah yang tergolong belanja publik yang semestinya dapat meningkatkan ksejahteraan masyarakat dan besaran pengeluaran pemerintah setiap provinsi setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi peningkatan tersebut belum bisa dialokasikan secara merata ke seluruh daerah dan masyarakat secara keseluruhan belum bisa merasakan secara langsung dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah .Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dam mengurangi ktimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakt , pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik yaitu secara langsung berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dan secara tidak langsung melalui belanja subsidi ( subsidi pendidikan) , belanja hibah , belanja bantuan sosial (subsidi kesehatan) , belanja bantuan keuangan kepada prov/kab/kota dan pemdes dan belanja tidak terduga.



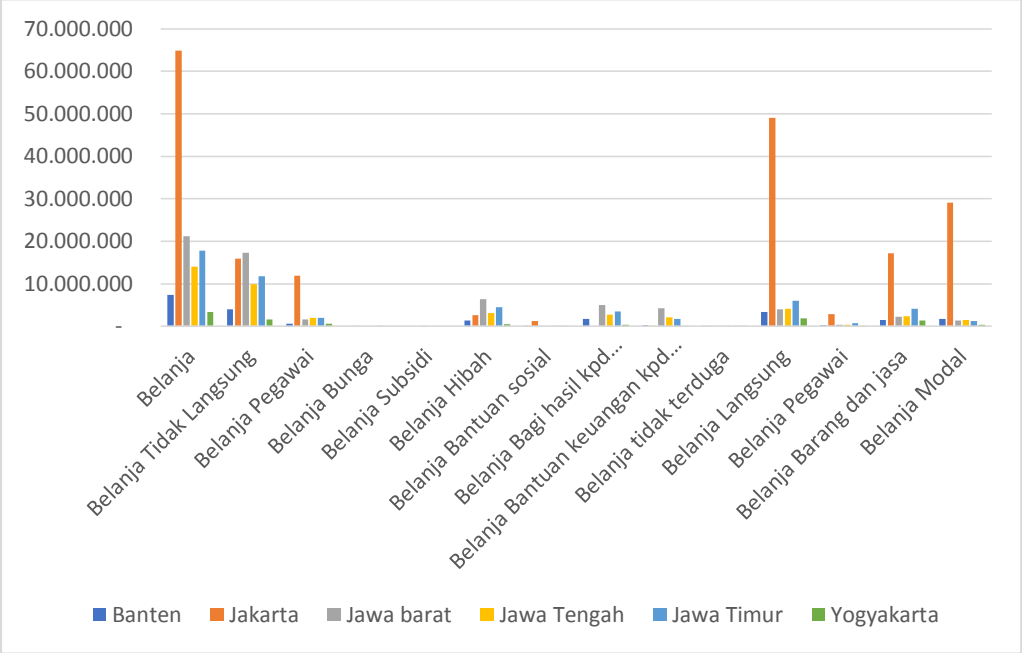

**Grafik 4. 1 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2011 (DJKP 2011)**



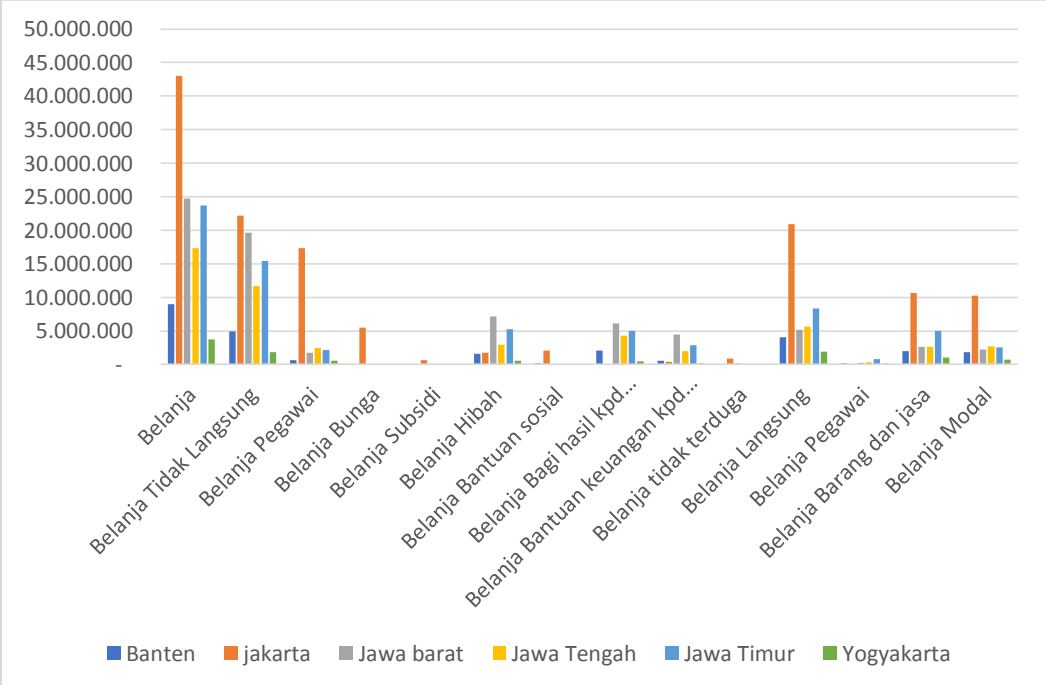

**Grafik 4. 2 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2012 (DJPK 2012)**



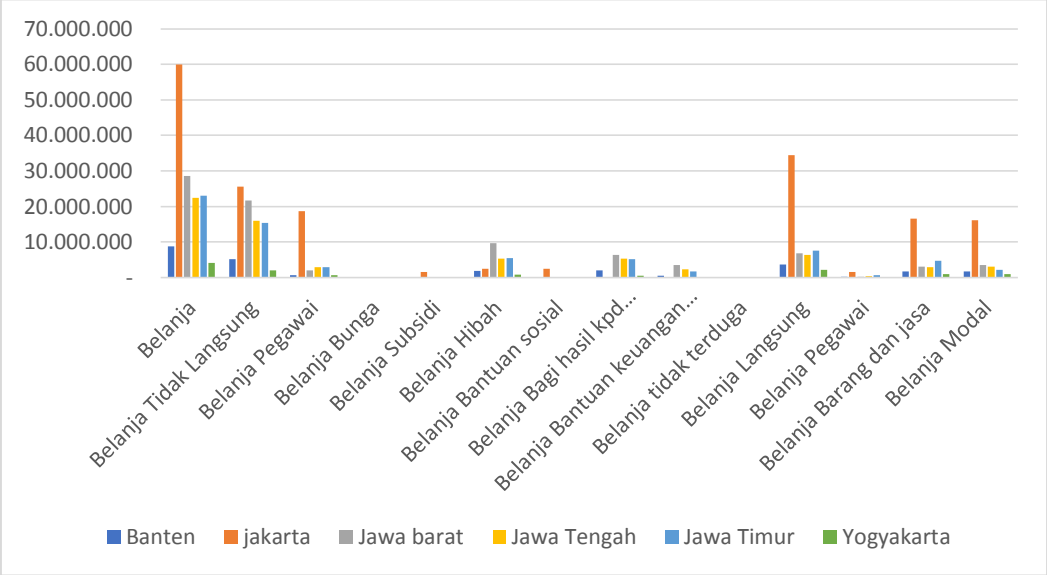

**Grafik 4. 3 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013 (DJPK 2013)**




**Grafik 4. 4 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 (DJPK 2014)**




**Grafik 4. 5 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 (DJPK 2015)**




**Grafik 4. 6 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016 (DJPK 2016)**

### 4.5.4 Analisis Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil estimasi *Random Effect* (Tabel 4.3) PDRB (Produk Domestik Bruto) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dilihat dari koefisien PDRB (Produk Domestik Bruto) sebesar 0.036967, artinya bahwa apabila PDRB naik 1% maka ketimpangan distribusi pendapatan turun sebesar 0.036967 % . Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Nangarumba, 2015) yang menunjukkan bahwa PDRB sektor pertanian dan PDRB sektor jasa berpengaruh negatif dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia . Penelitian ini juga sesuai dengan (Sultan & Sodik, 2010) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di

DIY dan Jawa Tengah . Penelitian ini sesuai dengan (Sunanda, 2017) yang menujukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi bengkulu .

### 4.5.5 Klasifikasi Kelompok Estimasi Intersep Provinsi di Pulau jawa

**Tabel 4. 9 Klasifikasi Kelompok Estimasi Intersep Provinsi di Pulau jawa**

| No | Provinsi | Intersep | Koefisien | Konstanta |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0.411285 | |
| 1 | Banten | -0.007712 | | 0.403573 |
| 2 | Jawa Barat | 0.011076 | | 0.422361 |
| 3 | DKI Jakarta | 0.002839 | | 0.414124 |
| 4 | Jawa Tengah | -0.010974 | | 0.400311 |
| 5 | Jawa Timur | 1.65E-05 | | 0.411285 |
| 6 | DI Yogyakarta | 0.004754 | | 0.416039 |
| | | | | |

***Sumber : eviews 9 , diolah***

Intersep yang dimiliki masing-masing *cross section* diyakini bahwa pada setiap provinsi pada penelitian ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam pengimplementasian variabel bebas dalam peran menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan pada provinsi di pulau jawa.

Seperti pada tabel 4.7 dimana setelah penjumlahan antara intersep dan koefisien didapatkan hasil bahwa provinsi jawa barat memiliki nilai konstanta paling tinggi sebesar 0.422361. Maka dapat asumsikan semua variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sebaliknya provinsi jawa tengah memiliki nilai konstanta paling rendah sebesar 0.400311. Maka dapat dasumsikan bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini belum bisa menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan

# BAB V

# KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya , maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Ketimpangan distribusi pendapatan yang tertinggi di pulau jawa adalah Jawa Barat dan yang terendah adalah Jawa tengah .
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada provinsi di pulau jawa. Hal ini berati inflasi suatu daerah tidak mempengaruhi tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.
3. Hasil peneliatan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa. Hal ini berati jumlah penduduk miskin di pulau jawa tidak mempengaruhi tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada provinsi di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah justru malah semakin besar pula ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa . Hal ini disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah di setiap provinsi belum bisa merata dalam pengalokasian dalam kegiatan produktif sehingga masyarakat belum bisa

merasakan secara penuh dari manfaat kebijakan pengeluaran pemerintah yang sudah di lakukan dan struktur ekonomi di setiap provinsi berbeda sehingga kebijakan pengeluaran pemerintah ini belum bisa menurunkan tingkat ketimpangan distibusi pendapatan.

5. Hasil penelitian menemukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada provinsi di pulau jawa. Hal ini berati kenaikan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah maka dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.
6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Inflasi , Jumlah Penduduk Miskin , Pengeluaran Pemerintah , dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama-sama signifikant mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan .

## 5.2 Implikasi :

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu :

1. Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu , pemerintah harus lebih serius dan hati-hati dalam penetapan strategi pengalokasian dan pendistribusian pengeluaran pemerintah secara merata sehingga dengan penerapan kebijakan pengalokasian pengeluaran pemerintah yang tepat bisa menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa .

2. Penelitian ini menjelasakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dengan ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa . Jadi , pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB tanpa harus memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan yang akan timbul pada tiap provinsi dengan cara , pemerintah daerah harus berperan aktif untuk memberikan fasilitas usaha padat karya sehingga akan menimbulkan pengembangan ekonomi yang berorientasi pada terciptanya perluasan lapangan pekerjaan, Dalam menunjang usaha padat karya tersebut , pemerintah dapat memberikan KUR supaya modal untuk membangun suatu usaha tidak terhambat.

# DAFTAR PUSTAKA


Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

BI. (2018). Produk Domestik Regional Bruto. Retrieved March 1, 2018, from http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/8_PDRB_SEKDA_v2.pdf

BPS. (2018a). Inflasi. Retrieved March 23, 2018, from https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html#subjekViewTab1

BPS. (2018b). Kemiskinan dan Ketimpangan. Retrieved February 28, 2018, from https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1

Danawati, S., Bendesa, I. K., & Suyana Utama, M. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Bisnis Universitas Udayana*, *57*, 2123–2160.

Dhyatmika, K. W., & Atmanti, H. D. (2013). Analisis ketimpangan pembangunan provinsi banten pasca pemekaran. *Diponegoro Journal of Economics*, *2*(2), 1–8.

Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.

Hakim, A. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia.

Jhingan, M. . (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan daerah*. Jakarta: Erlangga.

Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Lestari, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempenagruhi Ketimpangan Pendapatan*

*di Jawa Timur Tahun 2008-2012*. Retrieved from http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73804/SUSI LESTARI.pdf?sequence=1

Mangkoesoebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.

Muhaimin, I. F. (2014). *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2011*. Universitas Islam Indonesia.

Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi , Upah Minimum Provinsi , Belanja Modal , dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jesp*, *7*(2), 9–26.

Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sudarlan. (2015). Pertumbuhan Ekonomi , Ketimpangan , dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Eksis*, *11*.

Sukirno, S. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sukirno, S. (2010). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Sultan, & Sodik, J. (2010). Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional Di DIY-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Periode (2000-2004). *Buletin Ekonomi*, *8*, 1–70.

Sunanda, S. (2017). Ketimpangan Perekonomian Di Provinsi Bengkulu dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Tahun 2011-2014). *Skripsi*.

Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Jakarta: Erlangga.

Wahyuni, I. G. A. P., Sukarsa, M., & Yuliarmi, N. (2014). Pengaruh Pengeluaran

Pmerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *3*(8), 791–805.

Wicaksono, D. (2018). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015. *Skripsi. Universitas Islam Indonesia*.

Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. 1 Indeks Gini Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016**

| Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 0.402 | 0.437 | 0.404 | 0.436 | 0.421 | 0.397 |
| Jawa Barat | 0.38 | 0.422 | 0.406 | 0.398 | 0.426 | 0.402 |
| Jawa Tengah | 0.357 | 0.372 | 0.39 | 0.388 | 0.382 | 0.357 |
| DI Yogyakarta | 0.423 | 0.449 | 0.416 | 0.435 | 0.42 | 0.425 |
| Jawa Timur | 0.351 | 0.362 | 0.368 | 0.403 | 0.403 | 0.402 |
| Banten | 0.394 | 0.384 | 0.38 | 0.424 | 0.386 | 0.392 |

**Lampiran 1. 2 Pengeluaran pemerintah Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016**

| Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 27875807 | 33827032 | 45576329 | 64882747 | 43031322 | 59945522 |
| Jawa Barat | 9887011 | 15804297 | 17516652 | 21194365 | 24753758 | 28603282 |
| Jawa Tengah | 6062150 | 11245744 | 12730237 | 13997158 | 17337686 | 22426201 |
| Di Yogyakarta | 1590786 | 2124289 | 2454919 | 3330069 | 3696265 | 4189992 |
| Jawa Timur | 10626361 | 12214783 | 15356564 | 17811135 | 23720920 | 23050802 |
| Banten | 3485295 | 4134075 | 6052003 | 7349402 | 8947634 | 8005287 |

**Lampiran 1. 3 Presentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016**

| Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 3.75 | 3.7 | 3.72 | 4.09 | 3.61 | 3.75 |
| Jawa Barat | 10.65 | 9.89 | 9.61 | 9.18 | 9.57 | 8.77 |
| Jawa Tengah | 15.76 | 14.98 | 14.44 | 13.58 | 13.32 | 13.19 |
| DI Yogyakarta | 16.08 | 15.88 | 15.03 | 14.55 | 13.16 | 13.1 |
| Jawa Timur | 14.23 | 13.08 | 12.73 | 12.28 | 12.28 | 11.85 |
| Banten | 6.32 | 5.71 | 5.89 | 5.51 | 5.75 | 5.36 |

**Lampiran 1. 4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016**

| Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 1147558 | 1222528 | 1296695 | 1373389 | 1454346 | 1539377 |
| Jawa Barat | 965622 | 1028410 | 1093544 | 1149216 | 1207083 | 1275546 |
| Jawa Tengah | 656268 | 691343 | 726655 | 764959 | 806775 | 849384 |
| DI Yogyakarta | 68050 | 71702 | 75627 | 79536 | 83474 | 87688 |
| Jawa Timur | 1054402 | 1124465 | 1192790 | 1262684 | 1331395 | 1405236 |
| Banten | 290546 | 310386 | 331099 | 349351 | 368217 | 387595 |

**Lampiran 1. 5 Inflasi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016**

| Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKIJakarta | 3.97 | 4.52 | 8 | 8.95 | 3.3 | 2.37 |
| Jawa Barat | 3.1 | 3.86 | 9.15 | 7.6 | 2.73 | 2.75 |
| Jawa Tengah | 2.68 | 4.24 | 7.99 | 8.22 | 2.73 | 2.38 |
| DI Yogyakarta | 3.88 | 3.88 | 7.32 | 6.59 | 3.09 | 2.29 |
| Jawa Timur | 4.09 | 4.5 | 7.59 | 7.77 | 3.08 | 2.74 |
| Banten | 3.45 | 4.37 | 9.65 | 10.2 | 4.29 | 2.49 |

**Lampiran 1. 6 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2011**

| Provinsi | Banten | jakarta | Jawa barat | Jawa Tengah | Jawa Timur | Yogyakarta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Belanja** | 3.485.295 | 27.875.807 | 9.887.011 | 6.062.150 | 10.626.361 | 1.590.786 |
| **Belanja Tidak Langsung** | 1.764.097 | 9.534.313 | 7.120.176 | 3.833.963 | 5.797.640 | 849.118 |
| Belanja Pegawai | 345.901 | 8.521.389 | 1.729.963 | 1.183.394 | 1.497.005 | 443.440 |
| Belanja Bunga | - | 4.354 | - | - | 4.878 | - |
| Belanja Subsidi | - | - | 51.400 | - | - | - |
| Belanja Hibah | 340.463 | 865.614 | 268.887 | 84.462 | 974.301 | 7.619 |
| Belanja Bantuan sosial | 51.000 | 58.528 | 335.893 | 269.006 | 87.715 | 105.752 |
| Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 730.617 | - | 2.155.162 | 1.072.414 | 2.229.468 | 215.128 |
| Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 291.116 | 1.350 | 2.543.872 | 1.199.687 | 963.160 | 67.180 |
| Belanja tidak terduga | 5.000 | 83.078 | 35.000 | 25.000 | 41.112 | 10.000 |
| **Belanja Langsung** | 1.721.198 | 18.341.494 | 2.766.835 | 2.228.187 | 4.828.721 | 741.667 |
| Belanja Pegawai | 130.439 | 1.212.460 | 325.901 | 206.958 | 833.870 | 90.164 |
| Belanja Barang dan jasa | 937.361 | 9.071.100 | 1.675.660 | 1.592.171 | 3.094.389 | 501.330 |
| Belanja Modal | 653.398 | 8.057.934 | 765.273 | 429.058 | 900.462 | 150.174 |

**Lampiran 1. 7 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2012**

| | Banten | Jakarta | Jawa barat | Jawa Tengah | Jawa Timur | Yogyakarta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Belanja** | 4.134.075 | 33.827.032 | 15.804.297 | 11.245.744 | 12.214.783 | 2.124.289 |
| **Belanja Tidak Langsung** | 2.039.583 | 11.507.409 | 12.410.128 | 8.298.694 | 6.608.155 | 1.267.028 |
| Belanja Pegawai | 367.476 | 10.043.911 | 1.650.063 | 1.252.523 | 1.668.623 | 490.659 |
| Belanja Bunga | - | 4.354 | - | - | 6.139 | - |
| Belanja Subsidi | - | - | 10.000 | - | - | - |
| Belanja Hibah | 289.420 | 1.367.245 | 4.851.652 | 3.245.139 | 1.067.322 | 355.794 |
| Belanja Bantuan sosial | 28.750 | 31.190 | 13.335 | 7.373 | 31.358 | 94.675 |
| Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 983.951 | - | 2.715.593 | 1.876.986 | 2.292.840 | 251.788 |
| Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 364.986 | 1.350 | 2.995.624 | 1.886.673 | 1.490.172 | 54.112 |
| Belanja tidak terduga | 5.000 | 59.359 | 173.859 | 30.000 | 51.700 | 20.000 |
| **Belanja Langsung** | 2.094.492 | 22.319.623 | 3.394.169 | 2.947.051 | 5.606.629 | 857.261 |
| Belanja Pegawai | 142.946 | 1.362.028 | 358.041 | 338.587 | 957.620 | 111.508 |
| Belanja Barang dan jasa | 916.577 | 10.013.189 | 1.751.554 | 1.946.778 | 3.604.242 | 527.794 |
| Belanja Modal | 1.034.968 | 10.944.406 | 1.284.574 | 661.685 | 1.044.767 | 217.959 |

**Lampiran 1. 8 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013**

| | Banten | jakarta | Jawa barat | Jawa Tengah | Jawa Timur | Yogyakarta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Belanja** | 6.052.003 | 45.576.329 | 17.516.652 | 12.730.237 | 15.356.564 | 2.454.919 |
| **Belanja Tidak Langsung** | 3.216.559 | 14.582.866 | 13.841.423 | 9.218.308 | 9.340.219 | 1.427.652 |
| Belanja Pegawai | 431.461 | 10.848.791 | 1.673.210 | 1.546.700 | 1.725.859 | 503.343 |
| Belanja Bunga | | 4.354 | | | 5.517 | |
| Belanja Subsidi | | | 10.000 | | | |
| Belanja Hibah | 1.405.020 | 2.023.255 | 5.350.065 | 3.978.088 | 4.193.688 | 467.337 |
| Belanja Bantuan sosial | 70.000 | 1.551.668 | 25.500 | 11.862 | 77.198 | 15.956 |
| Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 1.210.988 | | 3.205.445 | 2.206.450 | 2.372.921 | 306.120 |
| Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 89.090 | 46.350 | 3.144.916 | 1.437.313 | 903.036 | 124.471 |
| Belanja tidak terduga | 10.000 | 108.448 | 432.287 | 37.894 | 62.000 | 10.426 |
| **Belanja Langsung** | 2.835.444 | 30.993.463 | 3.675.229 | 3.511.929 | 6.016.345 | 1.027.267 |
| Belanja Pegawai | 178.983 | 1.960.105 | 429.191 | 386.876 | 1.081.355 | 125.019 |
| Belanja Barang dan jasa | 1.055.979 | 13.300.732 | 2.053.580 | 2.129.003 | 3.942.848 | 609.743 |
| Belanja Modal | 1.600.482 | 15.732.627 | 1.192.458 | 996.050 | 992.143 | 292.505 |

**Lampiran 1. 9 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014**

| | Banten | Jakarta | Jawa barat | Jawa Tengah | Jawa Timur | Yogyakarta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Belanja** | 7.349.402 | 64.882.747 | 21.194.365 | 13.997.158 | 17.811.135 | 3.330.069 |
| **Belanja Tidak Langsung** | 4.022.623 | 15.876.622 | 17.276.335 | 9.837.615 | 11.769.244 | 1.547.087 |
| Belanja Pegawai | 558.508 | 11.919.072 | 1.574.914 | 1.956.121 | 1.960.974 | 525.444 |
| Belanja Bunga | | 4.354 | | | 4.175 | |
| Belanja Subsidi | | | 10.000 | | | |
| Belanja Hibah | 1.367.549 | 2.617.225 | 6.381.479 | 3.038.721 | 4.536.420 | 488.153 |
| Belanja Bantuan sosial | 91.000 | 1.220.978 | 15.000 | 31.666 | 12.149 | 14.632 |
| Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 1.766.696 | | 4.921.517 | 2.720.714 | 3.463.119 | 378.008 |
| Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 233.870 | 36.350 | 4.259.950 | 2.060.392 | 1.728.358 | 130.851 |
| Belanja tidak terduga | 5.000 | 78.644 | 113.475 | 30.000 | 64.050 | 10.000 |
| **Belanja Langsung** | 3.326.779 | 49.006.125 | 3.918.030 | 4.159.543 | 6.041.891 | 1.782.982 |
| Belanja Pegawai | 159.273 | 2.865.725 | 318.075 | 315.191 | 698.359 | 96.355 |
| Belanja Barang dan jasa | 1.472.890 | 17.104.027 | 2.210.158 | 2.402.376 | 4.124.058 | 1.287.508 |
| Belanja Modal | 1.694.616 | 29.036.373 | 1.389.797 | 1.441.976 | 1.219.474 | 399.120 |

**Lampiran 1. 10 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015**

| | Banten | jakarta | Jawa barat | Jawa Tengah | Jawa Timur | Yogyakarta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Belanja** | 8.947.634 | 43031322 | 24.753.758 | 17.337.686 | 23.720.920 | 3.696.265 |
| **Belanja Tidak Langsung** | 4.927.482 | 22153486 | 19.626.961 | 11.665.349 | 15.405.542 | 1.796.754 |
| Belanja Pegawai | 593.557 | 17312344 | 1.750.357 | 2.451.026 | 2.172.655 | 526.622 |
| Belanja Bunga | | 5478 | | | 2.829 | |
| Belanja Subsidi | | 659081 | 10.000 | | | |
| Belanja Hibah | 1.611.331 | 1717428 | 7.154.145 | 2.913.068 | 5.270.777 | 579.125 |
| Belanja Bantuan sosial | 136.250 | 2087123 | 12.000 | 28.557 | 7.010 | 9.134 |
| Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 2.025.840 | | 6.134.791 | 4.295.303 | 5.020.519 | 511.458 |
| Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 555.504 | 371152 | 4.448.669 | 1.947.395 | 2.856.753 | 147.414 |
| Belanja tidak terduga | 5.000 | 877074 | 117.000 | 30.000 | 75.000 | 23.000 |
| **Belanja Langsung** | 4.020.152 | 20877836 | 5.126.797 | 5.672.337 | 8.315.378 | 1.899.511 |
| Belanja Pegawai | 172.548 | | 237.421 | 349.994 | 779.474 | 137.325 |
| Belanja Barang dan jasa | 1.991.961 | 10633820 | 2.656.964 | 2.645.250 | 4.969.939 | 1.063.345 |
| Belanja Modal | 1.855.643 | 10244016 | 2.232.413 | 2.677.093 | 2.565.964 | 698.841 |

**Lampiran 1. 11 Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016**

| | Banten | jakarta | Jawa barat | Jawa Tengah | Jawa Timur | Yogyakarta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Belanja** | 8.811.076 | 59.945.522 | 28.603.282 | 22.426.201 | 23.050.802 | 4.189.992 |
| **Belanja Tidak Langsung** | 5.201.735 | 25.562.945 | 21.755.509 | 16.039.277 | 15.394.673 | 2.070.916 |
| Belanja Pegawai | 651.528 | 18.715.193 | 2.104.513 | 2.935.693 | 2.891.277 | 632.402 |
| Belanja Bunga | | 30.000 | | | 1.787 | |
| Belanja Subsidi | | 1.612.726 | 15.000 | | | |
| Belanja Hibah | 1.847.838 | 2.550.498 | 9.658.666 | 5.359.325 | 5.504.707 | 768.176 |
| Belanja Bantuan sosial | 152.040 | 2.524.193 | 19.456 | 41.650 | 10.000 | 4.683 |
| Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 1.978.572 | | 6.384.562 | 5.356.597 | 5.230.830 | 561.340 |
| Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 536.755 | 1.818 | 3.523.311 | 2.299.344 | 1.656.070 | 91.814 |
| Belanja tidak terduga | 35.000 | 128.515 | 50.000 | 46.667 | 100.000 | 12.500 |
| **Belanja Langsung** | 3.609.341 | 34.382.577 | 6.847.772 | 6.386.924 | 7.656.129 | 2.119.075 |
| Belanja Pegawai | 159.567 | 1.575.091 | 271.904 | 376.107 | 625.129 | 150.710 |
| Belanja Barang dan jasa | 1.719.249 | 16.624.523 | 3.029.926 | 2.863.293 | 4.797.425 | 1.020.959 |
| Belanja Modal | 1.730.524 | 16.182.961 | 3.545.942 | 3.147.522 | 2.233.574 | 947.405 |

**Lampiran 1. 12 Hasil Uji Data Panel dengan Fixed Effect Model**

Dependent Variable: IG?
Method: Pooled Least Squares
Date: 04/11/18 Time: 20:57
Sample: 2011 2016
Included observations: 6
Cross-sections included: 6
Total pool (balanced) observations: 36

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.289123 | 0.953168 | 0.303329 | 0.7641 |
| INF? | 0.001243 | 0.001327 | 0.937136 | 0.3573 |
| PM? | 0.000110 | 0.006218 | 0.017701 | 0.9860 |
| LOG(PDRB?) | -0.016518 | 0.096894 | -0.170479 | 0.8660 |
| LOG(PP?) | 0.019788 | 0.027079 | 0.730774 | 0.4715 |
| Fixed Effects (Cross) | | | | |
| _BANTEN--C | -0.002064 | | | |
| _JABAR--C | 0.008240 | | | |
| _JAKARTA--C | 0.004890 | | | |
| _JATENG--C | -0.022901 | | | |
| _JATIM--C | -0.012397 | | | |
| _YOGYA--C | 0.024232 | | | |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.653350 | Mean dependent var | 0.399833 |
| Adjusted R-squared | 0.533356 | S.D. dependent var | 0.024867 |
| S.E. of regression | 0.016987 | Akaike info criterion | -5.082599 |
| Sum squared resid | 0.007503 | Schwarz criterion | -4.642733 |
| Log likelihood | 101.4868 | Hannan-Quinn criter. | -4.929074 |
| F-statistic | 5.444845 | Durbin-Watson stat | 2.394955 |
| Prob(F-statistic) | 0.000319 | | |

**Lampiran 1. 13 Hasil Uji Data Panel dengan Random Effect Model**

Dependent Variable: IG?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 04/11/18 Time: 20:58
Sample: 2011 2016
Included observations: 6
Cross-sections included: 6
Total pool (balanced) observations: 36
Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.411285 | 0.103556 | 3.971632 | 0.0004 |
| INF? | 0.001093 | 0.001169 | 0.934438 | 0.3573 |
| PM? | -0.000923 | 0.001455 | -0.634306 | 0.5305 |
| LOG(PDRB?) | -0.031678 | 0.009708 | -3.262908 | 0.0027 |
| LOG(PP?) | 0.025315 | 0.009876 | 2.563160 | 0.0154 |
| Random Effects (Cross) | | | | |
| _BANTEN--C | -0.007712 | | | |
| _JABAR--C | 0.011076 | | | |
| _JAKARTA--C | 0.002839 | | | |
| _JATENG--C | -0.010974 | | | |
| _JATIM--C | 1.65E-05 | | | |
| _YOGYA--C | 0.004754 | | | |

| Effects Specification | S.D. | Rho |
|---|---|---|
| Cross-section random | 0.011200 | 0.3030 |
| Idiosyncratic random | 0.016987 | 0.6970 |

| Weighted Statistics | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.306567 | Mean dependent var | 0.210492 |
| Adjusted R-squared | 0.217091 | S.D. dependent var | 0.018850 |
| S.E. of regression | 0.016679 | Sum squared resid | 0.008624 |
| F-statistic | 3.426273 | Durbin-Watson stat | 2.077641 |
| Prob(F-statistic) | 0.019741 | | |

| Unweighted Statistics | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.473740 | Mean dependent var | 0.399833 |
| Sum squared resid | 0.011390 | Durbin-Watson stat | 1.573073 |

**Lampiran 1. 14 Hasil Uji Data Panel dengan Common Effect Model**

Dependent Variable: IG?
Method: Pooled Least Squares
Date: 04/11/18 Time: 21:00
Sample: 2011 2016
Included observations: 6
Cross-sections included: 6
Total pool (balanced) observations: 36

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | -7.77E-15 | 2.27E-15 | -3.419704 | 0.0018 |
| INF? | -2.27E-17 | 3.59E-17 | -0.632076 | 0.5320 |
| IG? | 1.000000 | 4.85E-15 | 2.06E+14 | 0.0000 |
| LOG(PDRB?) | 0.000000 | 2.66E-16 | 0.000000 | 1.0000 |
| LOG(PP?) | 0.000000 | 2.66E-16 | 0.000000 | 1.0000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 1.000000 | Mean dependent var | 0.399833 |
| Adjusted R-squared | 1.000000 | S.D. dependent var | 0.024867 |
| S.E. of regression | 5.21E-16 | Akaike info criterion | -67.41497 |
| Sum squared resid | 8.42E-30 | Schwarz criterion | -67.19504 |
| Log likelihood | 1218.469 | Hannan-Quinn criter. | -67.33821 |
| F-statistic | 1.99E+28 | Durbin-Watson stat | 0.872668 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

**Lampiran 1. 15 Hasil Pengujian Chow Test**

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: FIXED
Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|---|---|---|---|
| Cross-section F | 2.589868 | (5,26) | 0.0498 |
| Cross-section Chi-square | 14.549951 | 5 | 0.0125 |

**Lampiran 1. 16 Hasil Pengujian Chow Test**

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: RANDOM
Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|---|---|---|---|
| Cross-section random | 2.885501 | 4 | 0.5772 |